

**Dokumentasi Hasil Pendampingan Liputan
Program OPD Kaltim Dalam Rangkaian Kegiatan
Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund
tahun 2020**



Instagram



pemprov_kaltim

Desa Sangkima



15 September 2020



Sosialisasi Proklam Plus Di Sangkima

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltim melaksanakan sosialisasi kegiatan Program Kampung Iklim (Proklam) Plus dan Simulasi Sistem Registri Nasional (SRN) 2020 di Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selasa (15/09).

Kegiatan sosialisasi ini adalah lanjutan program penurunan emisi karbon atau yang dikenal dengan Forest Carbon Partnership Facility - Carbon Fund (FCPF-CF).

Kepala DLH Kaltim melalui Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Syahrir mengungkapkan Desa Sangkima menjadi salah satu dari 150 desa yang terpilih dan didaftarkan dalam Proklam Plus di Kalimantan Timur.

"Dalam program ini diharapkan desa-desa terpilih dapat berkomitmen untuk menjaga tutupan lahan dan memanfaatkan lahan dalam menjaga lingkungan sehingga ada keuntungan berupa insentif, yang akan didapatkan hanya jika desa tetap konsisten dalam menjaga lingkungan," ungkap Syahrir.

Sementara, Sekretaris Desa Sangkima, Iwan, mengaku beruntung karena desanya terpilih masuk dalam Proklam Plus.

"Kita beruntung masuk dalam salah satu desa yang terpilih dalam kegiatan ini," ucapnya.

Desa Sangkima menjadi desa pertama sebagai tempat diadakannya Kegiatan Sosialisasi Proklam Plus oleh DLH Kaltim pada tahun 2020 dan dihadiri 30 peserta dari masyarakat Desa Sangkima. (cin/her/yans/humasprovkaltim).

Foto : Cinthia Ayu Azhari

www.kaltimprov.go.id

[#pemprov_kaltim](https://www.instagram.com/pemprov_kaltim)

[#kaltimberdaulat](https://www.instagram.com/kaltimberdaulat)

[#humasprovkaltim](https://www.instagram.com/humasprovkaltim)

[#lawancovid19](https://www.instagram.com/lawancovid19)

[#infokaltim](https://www.instagram.com/infokaltim)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Sangatta Selatan



17 September 2020



Ikut Lestarikan Lingkungan

Sosialisasi kegiatan Program Kampung Iklim (Proklam) Plus dan Simulasi Sistem Registri Nasional (SRN) 2020 kembali dilaksanakan.

- Program berlingkup nasional dikelola Kementerian LHK dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim sosialisasi agar desa-desa di Kaltim dapat mengikuti program lanjutan Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF).

Kepala DLH Kaltim melalui Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Syahrir menyampaikannya bagi warga di Kantor Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Kamis (17/9/2020).

Syahrir berharap Sangatta Selatan ikut berperan dalam melestarikan lingkungan melalui kegiatan Proklam dan SRN. “Kenapa? Karena melalui program ini, kita berkontribusi dalam perubahan iklim,” kata Syahrir.

Penjabat (Pj) Kepala Desa Sangatta Selatan Bernardus Parembang mengatakan siap melaksanakan program. “Desa Sangatta Selatan berkomitmen siap menyukseskan program ini. Kami akan menggerakkan semua elemen pemerintah desa agar ada dampak yang dirasakan masyarakat,” kata Bernardus.

Desa Sangatta Selatan merupakan tempat kedua Sosialisasi Proklam Plus oleh DLH Kaltim pada 2020. Kegiatan diikuti 30 warga dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19. (ky/yans/humasprovkaltim)

Foto. : Arief M
www.kaltimprov.go.id
[#pemprov_kaltim](https://www.instagram.com/pemprov_kaltim)
[#kaltimberdaulat](https://www.instagram.com/kaltimberdaulat)
[#humasprovkaltim](https://www.instagram.com/humasprovkaltim)
[#lawancovid19](https://www.instagram.com/lawancovid19)
[#infokaltim](https://www.instagram.com/infokaltim)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Santan Ulu



19 September 2020



FCPF di Santan Ulu

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim kembali Sosialisasi Program Kampung Iklim Plus dan Simulasi Sistem Registri Nasional (SRN) tahun 2020. Kali ini di Desa Santan Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu (19/9/2020).

•
•
•
Kepala DLH Kaltim melalui Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan H Syahrir mengungkapkan kegiatan di Desa Santan Ulu merupakan kunjungan ketiga DLH Kaltim guna sosialisasi Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF).

"Ada tiga lambang di spanduk sosialisasi, ini dimana salahnya ada lambang FCPF dan kita bisa sampai sini karena lambang tersebut. FCPF adalah program penurunan emisi karbon dan program ini sudah lama tetapi menyentuh masyarakat baru kali ini," ungkap Syahrir.

Syahrir menambahkan dari 34 provinsi hanya ada sekitar enam provinsi yang memiliki wilayah hutan dan bersaing dalam mengadakan proyek ini dan hanya Kaltim yang saat ini disetujui.

"Dengan syarat 150 desa harus punya tutupan hutan/lahan, tujuannya desa yang bisa diterapkan mempengaruhi walupun skala kecil, termasuk di Desa Santan Ulu ini," jelasnya

Sementara Kepala Desa Santan Ulu Heri Budiarto mengaku bangga karena desa yang dipimpinnya terpilih dalam 150 desa program kampung iklim (proklim) plus.

"Desa Santan Ulu mendapat kesempatan menjadi kampung iklim plus, terpilih menjadi salah satu dari 150 desa se Kaltim dan salah satu dari 15 desa di Kutai Kartanegara. Saya sangat menyambut baik dan siap menyukseskan proklim plus ini," jelasnya.

Sosialisasi menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dan dihadiri 35 warga Desa Santan Ulu. Tampak hadir Sekretaris Desa Santan Ulu dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa Santan Ulu. (cin/her/yans/humasprovkaltim).

Foto : Fathur / Cinthia

www.kaltimprov.go.id

[#pemprovkaltim](https://www.instagram.com/pemprovkaltim)

[#kaltimberdaulat](https://www.instagram.com/kaltimberdaulat)

[#humasprovkaltim](https://www.instagram.com/humasprovkaltim)

[#lawancovid19](https://www.instagram.com/lawancovid19)

[#infokaltim](https://www.instagram.com/infokaltim)



Instagram



pemprov_kaltim

Desa Muhuran



23 September 2020



Proklamasi Desa Muhuran

Program Forest Carbon Partnership Facility yang di laksanakan di Provinsi Kalimantan Timur membuat setiap instansi terkait berlomba-lomba untuk bersosialisasi bagi desa-desa yang terpilih dalam program penurunan emisi gas rumah kaca. Salah satunya, sosialisasi ke Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

-
-
-

Sosialisasi Kegiatan Program Kampung Iklim (Proklamasi) Plus dan Simulasi Registri Nasional (SRN) Tahun 2020 yang diadakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim.

Kegiatan mewakili Kepala DLH, dipimpin Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Syahrir berlangsung di Balai Desa Muhuran, Kecamatan Kota Bangun (23/09/2020).

Sosialisasi mengundang tokoh masyarakat Desa Muhuran. Walaupun di ruangan tertutup, acara tetap dilakukan dengan Protokol Kesehatan Covid-19.

Syahrir berharap melalui sosialisasi ini maka warga Muhuran diharapkan dapat berkontribusi dalam menangani perubahan iklim.

"Kita tidak bisa tinggal diam dengan perubahan iklim. Dampak besarnya air laut semakin naik setiap tahunnya dan kemarau panjang yang sangat berdampak bagi para petani Muhuran. Kita harus bersama-sama untuk menghadapi perubahan iklim ini" tegas Syahrir

Karenanya, Kepala Desa Muhuran Akhmad Noor mengungkapkan harus ada persiapan untuk perubahan iklim

"Ini juga untuk desa kita, Desa Muhuran ini. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat bagi hutan di desa kita ini" ujarnya.(ryn/yans/humasprovkaltim)

Foto : Ahmad Riyandi

www.kaltimprov.go.id

[#pemprov_kaltim](https://www.instagram.com/pemprov_kaltim)

[#kaltimberdaulat](https://www.instagram.com/kaltimberdaulat)

[#humasprovkaltim](https://www.instagram.com/humasprovkaltim)

[#lawancovid19](https://www.instagram.com/lawancovid19)

[#infokaltim](https://www.instagram.com/infokaltim)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Sungai Payang



25 September 2020

Proklim Sungai Payang

Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu menjadi desa yang kedua dilakukan sosialisasi kegiatan program kampung iklim (Proklim) Plus dan simulasi Sistem Registri Nasional (SRN) tahun 2020. Sebelumnya Desa Muhuran menjadi tujuan pertama Tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dipimpin oleh Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup H Syahrir

Desa yang di kepalai Rusdin berharap dengan adanya sosialisasi ini masyarakat dapat bersama-sama berkomitmen menjaga hutan Desa Sungai Payang.

“Semoga masyarakat Desa Sungai Payang dapat menerima program ini dengan baik dan siap berkomitmen untuk menjaga hutan yang ada,” tegas Kepala Desa Sungai Payang Rusdin.

Sementara Syahrir mengungkapkan bahwa Desa Sungai Payang ini sangat cocok sebagai kawasan Kampung Iklim Plus.

“Kegiatan yang kami sampaikan dalam sosialisasi ternyata sudah diterapkan di desa ini, sebab itu desa ini sangat cocok dinyatakan sebagai kampung iklim plus,” ungkap syahrir dalam sambutannya. (rian/yans/humasprovkaltim)

Foto. :. Ahmad Riyandi

www.kaltimprov.go.id

[#pemprov_kaltim](https://www.instagram.com/pemprov_kaltim)

[#kaltimberdaulat](https://www.instagram.com/kaltimberdaulat)

[#humasprovkaltim](https://www.instagram.com/humasprovkaltim)

[#lawancovid19](https://www.instagram.com/lawancovid19)

[#infokaltim](https://www.instagram.com/infokaltim)

Instagram



pemprov_kaltim

Hotel Mercure Samarinda



28 September 2020



Tim FPIC Siap Terjun Ke Desa

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan kegiatan Pembekalan Tim Pelaksana FPIC (Free, Prior, Informed and Consent) di Hotel Mercure Samarinda, Senin (28/9).

- Kepala DLH Kaltim Encek Ahmad Rafidin Rizal melalui Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Syahrir mengatakan dalam mewujudkan Program Kampung Iklim (Proklam) Plus guna mendukung program penurunan emisi Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund (FCPF-CF) di Kaltim, dibutuhkan kesediaan dan persetujuan dari 150 kampung iklim plus melalui persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa).

"Tujuan diadakannya pembekalan ini adalah agar tim FPIC dapat memberikan penjelasan tentang program kampung iklim plus dengan baik ke masyarakat sebelum terjun ke desa - desa di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Berau dan Paser," kata Syahrir.

Syahrir berharap semua desa terpilih ikut mendaftar Sistem Registri Nasional (SRN), karena merupakan syarat Bank Dunia (World Bank) dan juga kegiatan penting pentahapan dalam program FCPF. Melalui FPIC ini disampaikan informasi tanpa paksaan kepada desa.

Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim Prof Daddy Ruhiyat menambahkan bahwa semua desa-desa harus mendapatkan informasi yang utuh dari awal. "Semua komunikasi lokal maupun adat di harapkan terlibat secara aktif sehingga hutan tersisa dapat terpelihara eksistensinya," tambahnya.

Pada kesempatan ini juga diisi paparan dari Setyo Budi, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kaltim mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Covid -19.

Tim Pelaksana FPIC yang terpilih berjumlah 52 orang dan di bagi menjadi 13 tim. Mereka akan disebar ke desa-desa untuk menyampaikan informasi mengenai program FCPF khususnya Proklam plus.(cin/her/yans/humasprovkaltim)

Foto. :. Fathur Al – Qadrie

www.kaltimprov.go.id

[#pemprov_kaltim](https://www.instagram.com/pemprov_kaltim)

[#kaltimberdaulat](https://www.instagram.com/kaltimberdaulat)

[#humasprovkaltim](https://www.instagram.com/humasprovkaltim)

[#lawancovid19](https://www.instagram.com/lawancovid19)

[#infokaltim](https://www.instagram.com/infokaltim)



Instagram



pemprov_kaltim

Hotel Mercure Samarinda



29 September 2020



Pembekalan Tim FPIC

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltim mengadakan Pembekalan Tim Pelaksana FPIC (Free, Prior, Informed and Consent) hari ke dua di Hotel Mercure Samarinda, Selasa (29/9/2020).

- Pembekalan membahas Mekanisme Pembagian Manfaat, Penilaian Pemantauan Pelaporan (MMR), Safeguards, dan Kampung Iklim Plus.

Kasubbag Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Perkebunan Biro Perekonomian Setda Prov Kaltim Irwan Lesmana Saputra menjelaskan mekanisme pembagian manfaat dan dokumen rencana pembagian manfaat (BSP) telah memperoleh persetujuan awal oleh Bank Dunia, namun masih diperlukan perbaikan, dan akan evaluasi Maret 2021.

Program penurunan emisi gas rumah kaca ini diperjelas dengan rencana pembagian manfaat dan memiliki payung hukum berupa (rancangan) Peraturan Gubernur (Pergub) tentang mekanisme pembagian manfaat.

“Kami berharap dengan ada penjelasan ini pengalokasian dana dan pengelolaan anggaran Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Salah satunya Kelompok Kerja melakukan fungsinya dengan baik dan benar” jelasnya.

Semenrara Dosen Kehutanan Universitas Mulawarman Samarinda Ali menyampaikan Safeguard, yaitu SESA, merupakan bagian dari dokumen yang harus diselesaikan Kaltim dalam rangka praktek penerapan pembangunan penurunan emisi.

Sedangkan Rumina dari Tim Safeguard Kaltim menambahkan salah satu dokumen yang penting dalam safeguard adalah dokumen mekanisme penanganan pengaduan dan keluhan (FGRM).

Berikutnya, Konsultan Safeguard Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Reonaldus mengenai kerangka kerja pengelolaan lingkungan dan sosial (esmf).

Dalam pembekalan kali ini hadir juga Kasi Pemantauan dan Evaluasi REDD+. (cin/her/yans/humasprovkaltim)

Foto : Cinthia Ayu Azhari

www.kaltimprov.go.id

[#pemprov_kaltim](https://www.instagram.com/pemprov_kaltim)

[#kaltimberdaulat](https://www.instagram.com/kaltimberdaulat)

[#humasprovkaltim](https://www.instagram.com/humasprovkaltim)

[#lawancovid19](https://www.instagram.com/lawancovid19)

[#infokaltim](https://www.instagram.com/infokaltim)

Instagram



pemprov_kaltim

Hotel Mercure Samarinda



30 September 2020



Tuntas Pembekalan Tim FPIC

Rabu (30/09) menjadi hari terakhir pembekalan Tim FPIC (Free, Prior, Informed and Consent) yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Mercure Samarinda.

- Dalam pembekalan hari terakhir peserta mendapatkan pelajaran mengenai Simulasi Pertanggungjawaban Administrasi dan Keuangan yang disampaikan Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) Suriyati.

Kepada peserta Tim FPIC, Suriyati berharap agar tidak bingung dalam pertanggungjawaban administrasi keuangan dan tidak ada temuan jika diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"ini merupakan bekal agar mereka dapat mengerti bagaimana pertanggungjawaban swakelola dan menyadari bahwa setiap orang punya keinginan bukan sesuai aturan dan sejauh ini bisa mengerti selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang ada," jelas Suriyati.

Tim P3SEKPI menambahkan bahwa perencanaan anggaran serta kegiatan di tahun 2019 dan 2020 tidak berbeda jauh. Karena kegiatan FPIC ini dinamis dalam eksekusi perencanaan anggaran dan sifatnya berdasarkan swakelola tipe dua dan berdasarkan RAB, serta di kunci dengan Surat Perjanjian Kerja Sama setiap kegiatan.

Disisi lain, Dzul kifli dari DDPI kaltim mengharapkan proses FPIC bisa berjalan lancar dan masyarakat desa bisa menerima informasi dengan mudah melalui pendekatan dengan masyarakat.

Salah satu peserta FPIC Tim Kabupaten Kutai Timur Dadang Mukhrim dari Balitbangda merasa senang dan mengapresiasi DLH dan DDPI Katim yang telah menyelenggarakan pembekalan FPIC. Dan merasa para narasumber sangat jelas dan lugas dalam menyampaikan materi. (cin/her/yans/humasprovkaltim)

Foto. :. Fathur Al – Qadrie

www.kaltimprov.go.id

[#pemprovkaltim](https://www.instagram.com/pemprov_kaltim)

[#humasprovkaltim](https://www.instagram.com/humasprovkaltim)

[#lawancovid19](https://www.instagram.com/lawancovid19)

[#infokaltim](https://www.instagram.com/infokaltim)

[#indonesia](https://www.instagram.com/indonesia)

Instagram



pemprov_kaltim

Hotel Aston Samarinda



1 Oktober 2020



Matangkan Portal MMR

Dinas Lingkungan Hidup Kaltim difasilitasi Kementerian LHK dan P3SEKPI menggelar Rapat Pembahasan Penerjemahan Pelaporan Perhitungan Emisi, Benefit Sharing Mechanism (BSM) dan Alur Safeguards pada Portal Measurement, Monitoring and Report (MMR) Kaltim, di Hotel Aston Samarinda, selama dua hari (1-2 Oktober).

Di hari pertama, Kamis (1/10/2020), rapat ini dibagi dua sesi. Sesi pertama oleh Subdit MPV dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Lahan Kementerian LHK Wawan G, tentang presentasi outline pelaporan pelaksanaan REDD+ dari tingkat tapak ke sub nasional. Materi berikutnya progress update pengembangan portal MMR Kaltim oleh Tim Portal MMR Kaltim Rifan Rifai.

Sesi kedua, Tim Portal MMR Kaltim mempresentasikan IT teknis Draft Perhitungan Capaian Emisi. Ditutup sesi diskusi dan tindak lanjut.

Kepala DLH Kaltim diwakili Kasi Pemeliharaan LH Yudha Harfani mengatakan rapat merupakan tindak lanjut diskusi teknis portal MMR di pertengahan September lalu.

"Semua yang terlibat dalam tim Pokja ini mereka yang menguasai informasi teknologi (IT), masalah pendataan. Jadi kami menyerahkan kepada teman-teman di tim. Besar harapan, karena tanggung jawab bersama. Memang jika berhasil menjadi sebuah prestasi gemilang," kata Yudha.

Ini program baru yang diterima untuk menghitung penurunan tingkat emisi. Dimana sudah berlangsung sekitar 10 tahun lalu dan saat ini difokuskan, sehingga capaian penurunan emisi menjadi harapan daerah dan nasional tercapai dan kompensasi bisa didapatkan.

"Insya Allah kita bisa menyelesaikan, sehingga program FCPF bisa berjalan sukses di Kaltim dan Indonesia," pungkasnya.

Mekanisme pengisian portal MMR hierarkinya dari bawah, sumber data berupa aksi-aksi yang masuk dari bawah dari tingkat tapak baik masyarakat desa termasuk dunia usaha, semua dibawah komando OPD kabupaten/kota. OPD provinsi sifatnya memfasilitasi dan mendorong supaya kabupaten/kota berperan dalam memberikan data. Setelah itu data di inventarisir baru dihitung dan diregisterkan ke SRN sehingga target daerah maupun nasional bisa tercapai.(cin/her/yans/humasprovkaltim).

Foto. :. Adi Suseno

www.kaltimprov.go.id

[#pemprov_kaltim](https://www.instagram.com/pemprov_kaltim)

[#humasprovkaltim](https://www.instagram.com/humasprovkaltim)

Instagram



pemprov_kaltim

Tanah Grogot



1 Oktober 2020



Workshop Validasi ANKT

Dinas Perkebunan menggelar Workshop Verifikasi Validasi Data Perlindungan Areal Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Kabupaten Paser, Kamis 1 Oktober 2020.

Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim diwakili Sekretaris Disbun Kaltim Henny Herdianto menjelaskan kegiatan bertujuan mendapatkan target-target yang sudah disepakati bersama antar kabupaten dan provinsi melalui Deklarasi Perkebunan Berkelanjutan.

Disebutkannya, dari data 2019, terdapat 40 perusahaan besar swasta (PBS) kelapa sawit yang tercatat.

"Namun pada kegiatan hari ini yang diundang 24 perusahaan. Dan yang melaporkan arealnya baru 13 dari 40 PBS di Paser," sebutnya..

Berdasarkan komitmen atau perjanjian yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, Kabupaten Paser mempunyai komitmen untuk melakukan perlindungan areal NKT seluas 11.000 lebih.

"Luas ANKT yang telah diverifikasi dan divalidasi di Kaltim kurang lebih 114.000 dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebesar 417.505," ungkapnya.

Sementara Kadisbun Paser H Karoding menyambut baik atas terselegarannya workshop ini. Kegiatan guna mempersiapkan bekal antar kabupaten dan provinsi. Sehingga pada saatnya nanti memperoleh target dilindungi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

"Diajukan ke provinsi sebagai areal yang akan dinilai, diverifikasi dan dipantau sehingga dapat dibuktikan bahwa ANKT tersebut dilindungi," ujar Karoding.

Workshop kerjasama Disbun dengan FCPF diikuti 24 peserta dari PBS kelapa sawit dan OPD terkait Kabupaten Paser. Tampak hadir Konsultan FCPF Yohanes Budi dan Kabid Perkebunan Asmirilda. (ful/yans/humasprovkaltim)

Foto. : S. Syaiful Al – Qadrie

www.kaltimprov.go.id

[#pemprovkaltim](https://www.instagram.com/pemprov_kaltim)

[#humasprovkaltim](https://www.instagram.com/humasprovkaltim)

[#lawancovid19](https://www.instagram.com/lawancovid19)

[#infokaltim](https://www.instagram.com/infokaltim)

[#indonesia](https://www.instagram.com/indonesia)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Jonggon



1 Oktober 2020



Jonggon Jaga Lingkungan Lestari

KUTAI KARTANEGARA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan sosialisasi program kampung iklim (Proklam) plus dan simulasi sistem registrasi nasional (SRN) dalam rangka program forest carbon partnership facilities-carbon fund (FCPF-CF) di Kalimantan Timur.

Kali ini, DLH mengunjungi Jonggon Desa untuk sosialisasi. Sebab, Jonggon Desa menjadi salah satu wilayah yang terpilih menjadi kampung iklim plus.

"Kami ucapkan terimakasih kepada rombongan DLH yang sudah datang ke desa kami. Terpilihnya Jonggon menjadi kampung iklim plus mudah-mudahan menjadi berkah," tutur Kepala Desa Jonggon Sahrul, ketika membuka sosialisasi di Balai Desa Jonggon, Kamis (1/10/2020). Sahrul mengatakan pihaknya sangat bersyukur menjadi kampung yang terpilih. Sebab, tidak semua desa bisa terpilih. Syarat menjadi kampung iklim plus, harus memiliki lahan dengan tutupan hutan. "Ketika program ini berjalan maka akan luar biasa bagi kita. Program ini sangat bermanfaat untuk lingkungan. Lingkungan menjadi lestari dan akan ada income atau kompensasi untuk desa," ujar Sahrul.

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan dan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kaltim Syahrir mengatakan ada 150 desa yang terpilih menjadi kampung iklim di Kaltim. Ada 16 desa yang menjadi target sosialisasi bagian tanggungjawabnya. Jonggon merupakan desa ketujuh yang telah dikunjungi.

"Kampung iklim plus merupakan pengembangan dari program iklim. Hanya saja, cakupannya lebih luas. Bagaimana desa merencanakan tata ruang ke depan? Tentu dengan melihat kondisi dan kebutuhan desa. Merencanakan wilayah pertanian, permukiman, perkebunan dan hutan," terang Syahrir.

Syahrir mengatakan, pada program iklim plus bagaimana masyarakat menjaga hutan tapi tetap memberikan hasil manfaat ekonomi bagi mereka. Misalnya menjaga hutan agar mata air tidak hilang.

"Tak perlu pusing bagaimana menjaga hutan. Paling mudah, jaga saja agar tidak terbakar. Silahkan manfaatkan hasil hutan, asal jangan dibakar," ujar dia. (yuv/yans/humasprovkaltim)

Foto. :. Yuvita Indrasari

www.kaltimprov.go.id

[#pemprov_kaltim](https://www.instagram.com/pemprov_kaltim)

[#humasprov_kaltim](https://www.instagram.com/humasprov_kaltim)

[#lawancovid19](https://www.instagram.com/lawancovid19)

[#infokaltim](https://www.instagram.com/infokaltim)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Handil Terusan



3 Oktober 2020



Handil Terusan Ikut Proklim

KUTAI KARTANEGARA- Pemprov Kaltim melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan sosialisasi proklim di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara. Sosialisasi diikuti 35 peserta terdiri ketua RT, dusun, dan tokoh masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan.

- Sosialisasi program FCPF-CF di Kaltim. Proklim berlingkup nasional dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Proklim guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi guna meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal.

Kepala Desa Handil Terusan Achmadi berharap kegiatan proklim nantinya sinkron dengan kegiatan masyarakat desa dan pemerintah.

"Mudah-mudahan ini tidak hanya didengar, tapi bisa aktif dalam melakukan kegiatan proklim. Kita bersyukur Desa Handil Terusan menjadi salah satu tujuan, karena tidak semua desa dapat proklim," tutur Achmadi membuka sosialisasi di Balai Pertemuan Desa Handil Terusan, Sabtu (3/10/2020).

Achmadi berharap bisa membantu pelaksanaan proklim. Dari luas hutan, Handil Terusan dinilai memiliki potensi proklim.

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan dan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kaltim Syahrir memaparkan proklim plus. Dia menerangkan, kondisi cuaca di dunia kini mulai berubah akibat dari pemanasan global dan efek rumah kaca.

"Pencairan es di kutub berdampak meningkatnya volume air laut. Cuaca kini pun sudah tidak menentu, kapan musim hujan? Kapan musim panas? Kita tidak bisa anggap sepele, ini bukan hanya urusan pemerintah dan dunia. Bahkan, setingkat desa pun bisa turut andil," tutur Syahrir.

Ketika program ini berhasil dilaksanakan di Handil Terusan, akan ada dana kompensasi dari Bank Dunia. (yuv/yans/humasprovkaltim)

Foto. :. Yuvita Indrasari

www.kaltimprov.go.id

[#pemprovkaltim](https://www.instagram.com/pemprovkaltim)

[#humasprovkaltim](https://www.instagram.com/humasprovkaltim)

[#lawancovid19](https://www.instagram.com/lawancovid19)

[#infokaltim](https://www.instagram.com/infokaltim)

[#indonesia](https://www.instagram.com/indonesia)



Instagram



pemprov_kaltim

Desa Muara Pantuan



6 Oktober 2020



Proklim Muara Pantuan

Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara menjadi desa kedelapan di Kaltim yang disambangi DLH Kaltim dalam Sosialisasi Kegiatan Program Kampung Iklim (Proklim) Plus dan Simulasi Sistem Registri Nasional (SRN) Tahun 2020. Kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF).

Kepala DLH Kaltim melalui Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Syahrir menjelaskan latar belakang kegiatan Proklim Plus dalam kerangka FCPF-CF dan alasan Desa Muara Pantuan dipilih menjadi salah satu dari 150 desa yang masuk dalam Proklim Plus.

"Kedatangan kita kesini untuk menyampaikan langsung ke tingkat desa. Karena salah satu syarat dari Bank Dunia, desa yang masuk dan ikut dalam Proklim Plus FCPF ini harus tidak dengan paksaan. Disini masih memiliki tutupan lahan hutan mangrove (bakau) pesisir yang cukup baik," kata Syahrir di rumah Kepala Desa Muara Pantuan, Selasa (6/10/2020).

Syahrir menjelaskan 150 desa dari tujuh kabupaten/kota se Kaltim dipilih dalam Proklim Plus sudah melalui proses seleksi, namun tetap harus memenuhi syarat Bank Dunia selaku pengelola dana negara-negara donor FCPF, yakni desa harus menyatakan ikut dan masuk tanpa paksaan.

"Perubahan iklim ini merupakan masalah serius. Kita tidak bisa cuek. Kita bisa berbuat sesuai dengan kapasitas kita. Artinya kami mengajak masyarakat disini untuk memperbaiki lingkungan dengan praktik-praktik pemanfaatan mangrove berkelanjutan. Bisa dimulai menanam mangrove di wilayah (tambak) sendiri, guna meningkatkan tutupan vegetasi," jelas Syahrir.

Sosialisasi di masa pandemi Covid-19 dilaksanakan menerapkan protokol kesehatan dan diikuti 30 peserta perwakilan dari 20 Rukun Tetangga (RT) di Desa Muara Pantuan. Hadir Kepala Desa Muara Pantuan H Edi dan Kasi Pemerintahan Hasmiyati serta jajaran Kantor Desa Muara Pantuan. (her/yans/humasprovkaltim).

Foto. :. Heru Rinaldy

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Kelurahan Margasari

-
-
-



6 Oktober 2020



Margasari Masuk Proklim

BALIKPAPAN - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bekerjasama dengan Pemprov Kaltim, Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim dan Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) menggelar Sosialisasi dan Pelaksanaan Padiatapa/FPIC dalam Program FCPF-Carbon Fund tingkat Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di Bontang Room Blue Sky Hotel, Balikpapan, Selasa (6/10/2020).

Sosialisasi dibuka Lurah Margasari Ride dan diikuti 30 warga Margasari termasuk anggota PKK dan Karang Taruna Kelurahan Margasari.

"Ini merupakan program yang bagus, tapi sangat disadari program ini masih perlu dukungan dan disosialisasikan hingga semua pihak menjadi bagian aktif dan memahami pelaksanaannya. Terlebih desa dan masyarakatnya sebagai faktor penting dalam penurunan emisi. Sehingga pihak yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan merasakan langsung dampak perubahan alamnya serta manfaat ekonominya" kata Ride.

Sementara, Ketua Tim FCPF Wilayah Balikpapan - PPU Rahmina menjelaskan program penurunan emisi merupakan upaya signifikan pemerintah provinsi dan nasional dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan guna memastikan langkah pembangunan hijau Kaltim dan Indonesia.

"Kampung yang dipilih bebas untuk menentukan akan mengikuti program ini atau tidak. Karena ini terkait pemberian insentif kepada kinerja yang diperoleh terhadap kegiatan berbasis penurunan emisi karbon. Jadi masyarakat kampung atau desa harus menjaga areal yang berhutan alam di kawasan hutan maupun APL, dalam upaya menurunkan emisi karbon dan mempertahankan karbon yang ada di kawasan hutan," jelas Rahmina.

Sosialisasi menghadirkan narasumber, Dr Halidina Marcham yang menyampaikan materi tentang Covid 19 dan dampak perubahannya. Kemudian, Ketua Tim FCPF-CF Rahmina dengan materi Program Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dibawah Skema FCPF-CF di Kaltim.(seno/yans/humasprovkaltim)

Foto .: Adi Suseno

- [#pemprovkaltim](#)
- [#humasprovkaltim](#)
- [#lawancovid19](#)
- [#infokaltim](#)
- [#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Deabeq



7 Oktober 2020



Sosialisasi Padiatapa di Desa Deabeq

Suksesnya pelaksanaan program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) tidak lepas dari kepedulian warga desa yang masuk Program Kampung Iklim (Proklim) Plus dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan hutan di wilayahnya. Untuk itu, Tim Free, Prior, Informed and Consent (FPIC) terus bergerak guna memastikan kesediaan 150 desa Proklim Plus dalam program FCPF-Cf.

Adalah Desa Deabeq, Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur yang menjadi sasaran Tim FPIC atau dikenal dengan Padiatapa (Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan) dalam melakukan sosialisasi.

Sosialisasi Program FCPF-CF berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Deabeq dan dibuka secara resmi oleh Camat Muara Wahau, Drs Ashari.

"Pemerintah Kecamatan Muara Wahau sangat mendukung agar Program FCPF-Carbon Fund ini dapat dilaksanakan disini. Seluruh peserta yang hadir agar dapat menyimak penjelasan dari para nara sumber yang nantinya akan menyampaikan informasi tentang Program FCPF-Carbon Fund," pesan Ashari.

Kepala Desa Deabeq Yohanes Loybag mengucapkan terima kasih dan sangat menyambut baik atas dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Program FCPF-Carbon Fund di Desa Deabeq.

Narasumber pada kegiatan kali ini berasal dari Ketua Tim FPIC Wilayah Kutim 2 Monica yang menyampaikan materi tentang Program FCPF-Carbon Fund. Selanjutnya, Tenaga Ahli P3MD Titus Bassa dengan materi tentang Arah Kebijakan Dana Desa dalam Mendukung Program FCPF-Carbon Fund.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Koramil, Kepala Adat, Ketua LPM, Kepala BPD, Ketua PKK, Perwakilan Guru, PPL dan tokoh masyarakat dengan jumlah peserta 35 orang. (her/yans/humasprovkaltim)

Foto. : Istimewa

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)



Instagram



pemprov_kaltim

Kelurahan Kariangau



7 Oktober 2020



Proklim Kariangau Bisa

BALIKPAPAN - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama Pemprov Kaltim dan Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) menggelar Sosialisasi dan Pelaksanaan Padiatapa/FPIC dalam Program FCPF-Carbon Fund tingkat Kota Balikpapan di Bontang Room Blue Sky Hotel, Balikpapan, Rabu (7/9/2020).

Hadir Ketua Tim Proklim Kariangau Bisa, Ketua Kelompok Tani, Ketua Kelompok Nelayan, kader PKK, tokoh masyarakat dan Babinsa Kelurahan Kariangau. Sosialisasi diikuti 50 warga dan acara ini dibuka Camat Balikpapan Barat M Arif Fadhillah

"Kita senang karena 2 kelurahan ini yang akan ditunjuk mengikuti kegiatan FCPF. Sebetulnya untuk kegiatan penurunan gas emisi ini, Kelurahan Kariangau sudah melaksanakan proklim. Semoga ini dapat meningkatkan motivasi warga disini," kata Arif Fadhillah.

Sementara, Ketua Tim FPIC Wilayah Balikpapan - PPU Rahmina menjelaskan pengurangan emisi yang signifikan. Tata kelola hutan akan memberi manfaat non karbon bagi para pemangku kepentingan lokal, perusahaan konsesi, masyarakat lokal dan adat.

"Program penurunan akan mengembangkan pedoman dan peraturan untuk mengintegrasikan kegiatan REFD+ ke dalam perencanaan tata ruang desa dan mendukung integrasi pengurangan emisi ke dalam rencana pembangunan desa," jelas Rahmina.

Menurut dia, program ini akan membangun kapasitas dan keterampilan lembaga desa untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan rendah emisi kedalam rencana pembangunan desa.

Lurah Kariangau M Iskandar berharap kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan masyarakatnya tentang maksud dan tujuan penurunan gas emisi. "Kegiatan yang sudah kami lakukan penanaman mangrove," ujar Iskandar

Kegiatan dirangkai penandatanganan berita acara Sosialisasi dan Pelaksanaan Padiatapa/FPIC dalam Program FCPF-Carbon Fund antara Ketua Tim FPIC, Camat Balikpapan Barat, Lurah Kariangau dan perwakilan peserta. (seno/yans/humasprovkaltim)

Foto. :. Adi Suseno

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#infokaltim](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Sambung



7 Oktober 2020



MPA Desa Sambung Dukung FCPF

Tim FPIC (Free, Prior, Informed, Consent) Kutai Barat 2 mengadakan Sosialisasi Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) dan Proklim Plus di Desa Sambung, Kecamatan Bentian Besar, Kutai Barat, Rabu (07/10). Kegiatan ini dalam rangka program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF).

Ketua Tim FPIC Kubar 2 Suimah yang juga menjadi salah satu pemateri menuturkan bahwa suasana desa sangat baik karena masyarakat sangat menjaga hutan dan juga bermata pencaharian dari hasil hutan dengan membuat kerajinan tikar dan rotan, serta madu.

"Kami berharap Desa Sambung akan ikut mendukung program FCPF ini," tuturnya.

Kepala Desa Sambung Kastianus menambahkan program penurunan emisi karbon ini bagus untuk masyarakat seiring telah ada upaya terutama terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan dibentuknya MPA (Masyarakat Peduli Api).

"Tidak dapat dipungkiri bahwa program ini baru kami dengar sehingga perlu waktu kami untuk memahami isi secara utuh walaupun ada sebagian masyarakat yang sudah dapat memahami. Terimakasih telah memilih Desa Sambung sebagai salah satu dari 150 desa Proklim Plus," jelasnya.

Desa Sambung memiliki lokasi yang cukup jauh dengan kondisi jalan tanah yang licin ketika habis hujan. Tidak adanya sinyal telepon selular dan jauh dari hiruk pikuk kota memiliki tantangan tersendiri bagi tim dalam melaksanakan sosialisasi. Kegiatan diadakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan dihadiri masyarakat Desa Sambung. (cin/her/yans/humasprovkaltim)

Foto. : Istimewa
[#pemprovkaltim](#)
[#humasprovkaltim](#)
[#lawancovid19](#)
[#infokaltim](#)
[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Hotel Blue Sky



8 Oktober 2020



Penurunan Emisi Sektor Perkebunan

BALIKPAPAN - Dinas Perkebunan menggelar Workshop Verifikasi Validasi Data Perlindungan Areal Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Hotel Blue Sky, Balikpapan (8/10/2020).

Dibuka oleh Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim Ujang Rachmad didampingi Kepala Dinas Perkebunan (disbun) Kabupaten Kukar M Taufik dan Ketua Koordinator Proyek FCPF Dr I Wayan Susi Dharmawan.

Ujang menyebutkan bahwa harus mencapai target penurunan emisi pada sektor perkebunan.

"FCPF , P3SEKPI dan KLHK bersama-sama mencapai komitmen penurunan emisi pada subsektor perkebunan. Program di subsektor ini kontribusinya sampai 51 persen itu penurunan emisi di kaltim," ujarnya.

Sektor perkebunan ini memang memiliki peranan penting dalam konteks penurunan emisi di kaltim. Salah satunya dari upaya kita untuk mengelola ANKT.

Sementara Kadisbun Kukar M Taufik menyampaikan tujuh kabupaten sudah menandatangani deklarasi yang visinya salah satunya adalah wajib melindungi areal - areal yang memiliki nilai konservasi tinggi.

"Kukar siap menyukseskan program FCPF melalui ANKT. Potensi perkebunan kami cukup besar dan produktif," ujarnya.

Workshop kerjasama Disbun dengan FCPF diikuti 28 peserta dari PBS dan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. (dea/yans/humasprovkaltim)

Foto .: Adea

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)



Instagram



pemprov_kaltim

Desa Jambuk



8 Oktober 2020



Desa Jambuk Siap Sukseskan FCPF

Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) merupakan program penurunan emisi karbon yang di usung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Salah satu proses dalam program tersebut adalah proses Padiatapa yaitu persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan.

Tim Padiatapa atau juga dikenal dengan FPIC (Free, Prior, Informed and Consent) telah dibentuk dan diberi pembekalan yang bertugas menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat di 150 desa terpilih se Kalimantan Timur. Tim Kubar 3 sebagai salah satu Tim FPIC yang telah dibentuk bergerak cepat melaksanakan sosialisasi mengenai informasi dasar program FCPF dan pelaksanaan Padiatapa di Desa Jambuk Kabupaten Kutai Barat, Kamis (8/10)

Ketua Tim Kubar 3 Rahajo sekaligus sebagai salah satu Narasumber berharap Desa Jambuk dapat mengikuti program FCPF yang merupakan program nasional ini.

"Program ini sangat penting untuk turut serta mengurangi emisi karbon, melalui salah satu cara, yaitu pengereman perusakan hutan di Kaltim, khususnya di wilayah Desa Jambuk, Kutai Barat," tegasnya.

Kepala Desa Jambuk yang diwakili oleh Sekretaris Desa Hendi dan Kasi Pelayanan menyampaikan pihak Desa Jambuk mengapresiasi program ini dan mengharapkan lahan lokasi hutan untuk dapat dirasakan anak cucu nanti

"Kami sangat mendukung program FCPF ini, karena kelestarian lingkungan khususnya hutan untuk warisan bagi anak cucu kita nanti," tegasnya

Sosialisasi dihadiri 30 orang masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda dan wanita dengan menerapkan protokol kesehatan. (cin/her/yans/humasprovkaltim)

Foto. : Fathur alqadrie

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Uko



8 Oktober 2020



Padiatapa Uko

Pemprov Kaltim terus melakukan Sosialisasi dan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) di Desa Uko, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser.

Sosialisasi merupakan rangkaian dari program penurunan emisi gas rumah kaca melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan berbasis yurisdiksi (Forest Carbon Partnership Facility Carbon).

"Kami datang untuk mengabarkan kepada masyarakat Desa Uko, apa itu efek gas rumah kaca, degradasi, deforestasi, perubahan iklim dan lain sebagainya. Alhamdulillah mereka mendukung, meski dengan beberapa syarat," kata Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Muhammad Syoim yang menjadi narasumber sosialisasi di Kantor Desa Uko, Muara Komam, Kamis (8/10/2020).

Sosialisasi juga menyinggung pengembangan peluang penghidupan alternatif bagi masyarakat Desa Uko dengan tetap menjaga wilayah berhutan.

Pengembangan ini akan mendukung program perhutanan sosial, kemitraan konservasi dan peluang pengembangan penghidupan alternatif bagi masyarakat melalui program pembangunan desa rendah emisi.

"Tidak ada paksaan dalam rencana ini. Kesadaran harus datang dari masyarakat agar mereka bisa tetap berpenghidupan tanpa merusak ekosistem hutan," tegas Syoim.

Kepala Desa Uko Ramallyah yakin warganya akan mendukung program penyelamatan hutan desa tersebut.

"Menurut saya program ini sangat bermanfaat. Kita jaga hutan dan kita dapat manfaat dari hutan dan alam. Dapat lagi kita program dari carbon fund. Kami akan rapatkan dengan masyarakat, saya yakin mereka pasti setuju," yakin Ramallyah.

Sosialisasi dihadiri Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Uko, Aryanto serta para tokoh masyarakat setempat. (sul/yans/humasprovkaltim)

Foto. :. Ahmad Riyandi

[#pemprov Kaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Long Wehea



8 Oktober 2020



Tim FPIC Pastikan Tanpa Paksaan

Tim FPIC (Free, Prior, Informed, Consent) yang telah dibentuk dan mendapat pembekalan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim terus bergerak cepat dalam rangka menyosialisasikan program penurunan emisi karbon ke 150 desa yang terpilih dalam Program Kampung Iklim (Proklam) Plus.

Salah satunya, Tim FPIC Kutai Timur 2 yang melakukan Sosialisasi Program Kampung Iklim Plus (Proklam +) dan Padiatapa (Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) di Desa Long Wehea, tepatnya di Ruang Serbaguna Kantor Desa Long Wehea, Kamis (08/10/2020).

Sosialisasi ini dibuka oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Muara Wahau Marlianto dan diikuti peserta sebanyak 35 orang yang berasal dari unsur Kepala BPD, LPM, PKK, kepala adat, tokoh masyarakat, pengurus BUMDes, kelompok tani, karang taruna dan pendamping lokal desa.

Kwtua Tim FPIC Wilayah Kutim 2 Monica Kusneti mengatakan Sosialisasi Program Kampung Iklim Plus dan Padiatapa ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

"Serta upaya mitigasi dan adaptasi akibat dampak perubahan iklim, selain itu juga melalui kegiatan ini nantinya akan dilakukan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan," kata Monica Kusneti.

Sementara Kasi PMD Muara Wahau bapak Marlianto menyambut baik atas upaya Pemprov Kaltim untuk melaksanakan kegiatan Kampung Iklim Plus di lima desa wilayah Kecamatan Muara Wahau. Ia pun berharap agar program ini tidak hanya sebatas sosialisasi saja tetapi juga terus berkelanjutan.

Foto. :. Istimewa
[#pemprovkaltim](#)
[#humasprovkaltim](#)
[#lawancovid19](#)
[#infokaltim](#)
[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Tani Baru



8 Oktober 2020



Ikut Proklim Tanpa Paksaan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltim bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) kembali menggelar Sosialisasi Kegiatan Program Kampung Iklim (Proklim) Plus dan Simulasi Sistem Registri Nasional (SRN) Tahun 2020.

Desa Tani Baru, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara yang memiliki tutupan lahan hutan mangrove (bakau) pesisir menjadi tujuan sosialisasi. Desa Tani Baru bersama Desa Muara Pantuan dan Desa Sepatin di Kecamatan Anggana merupakan desa di kawasan pesisir Kutai Kartanegara yang memiliki tutupan hutan mangrove, sehingga terpilih masuk dalam 150 desa Proklim Plus dalam kerangka FCPF-CF.

Kepala DLH Kaltim melalui Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan H Syahrir mengungkapkan luasan tutupan lahan di Desa Tani Baru sangat baik sehingga dipilih masuk Proklim Plus.

Namun, lanjut dia, meskipun terpilih, Desa Tani Baru baik kepala desa beserta masyarakatnya bisa masuk dan ikut Proklim Plus FCPF-CF tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

"Desa yang ikut tanpa paksaan. Ini menjadi salah satu syarat dari Bank Dunia yang mengelola dana 17 negara donor untuk program penurunan emisi karbon ini. Kami bersama tim Free, Prior, Informed, Consent (FPIC) turun ke 150 desa untuk menyampaikan informasi ini. Sehingga ketika sudah terdaftar dalam SRN, maka aparat desa bersama masyarakat lebih sadar dalam menjaga lingkungan, khususnya kelestarian hutan mangrove disini," urai Syahrir.

Kepala Desa Tani Baru H Ilyas mengatakan perubahan iklim dampaknya sudah dirasakan di lingkungan pesisir. Bahkan warganya yang mayoritas berprofesi nelayan ikut terdampak dengan menurunnya hasil tangkapan akibat cuaca yang tidak menentu.

Sosialisasi dilaksanakan penerapan protokol kesehatan. Diikuti 35 peserta dari unsur aparat desa dan perwakilan 20 Rukun Tetangga (RT) Desa Tani Baru. (her/yans/humasprovkaltim).

Foto. : Heru Rinaldy

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Tebangan Lembak



8 Oktober 2020



Masyarakat Lindungi Hutan

Setelah melaksanakan kegiatan di Desa Sangkima dan Sangatta Selatan, Tim FPIC (free prior inform concern) atau Padiatapa (Persetujuan Tanpa Paksaan atas dasar Informasi awal) melanjutkan sosialisasi program penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Program penurunan emisi melalui pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan berbasis yurisdiksi (FCPF-CF) di Kaltim kali ini dilaksanakan di Desa Tebangan Lembak Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, Kamis 8 Oktober 2020.

Sosialisasi dipimpin Ketua Tim Pelaksana FPIC Padiatapa Tim Kutai Timur 1 Adi Supriadi didampingi Fasilitator/Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Balibangda Kaltim Dadang Mukhrim.

Kegiatan dibuka Kepala Desa Tebangan Lembak Patahudin. Dihadiri Kepala Dusun Bastani, Ketua Adat Benang dan Ketua BUMDes Ediansyah, Ketua BPD Karsono, Babinsa Patty, Ketua RT 1 Badullahi, Ketua RT 2 Jamaludin dan Ketua RT 3 Jamriansyah dan seluruh warga Desa Tebangan Lembak.

Menurut Adi Supriadi, Tim FPIC mengajak masyarakat desa yang memiliki hutan agar ikut menjaga hutannya. Selain, memanfaatkan karbon dan penurunan emisi, desa juga akan menerima kompensasi dari Bank Dunia.

"Masyarakat tidak dipaksa dan terserah, mau menerima atau tidak. Namun, program ini memberi manfaat besar bagi desa dan kelestarian hutan mereka," kata Adi.

Sementara Kepala Desa Tebangan Lembak Patahudin menyebutkan kawasan hutan di desanya ada sekitar 200 hektar merupakan hutan adat.

"Kehidupan warga kami disini berburu dan bertani atau berkebun. Hutan menjadi sumber kehidupan masyarakat. Jadi, disuruh atau pun tidak, kami pasti menjaga dan memelihara hutan sebagai tempat nafkah kami," ujar Patahudin.

Terkait keinginan pemerintah melalui program FCPF-CF, Patahudin memastikan masyarakat pasti mendukung selama memberi manfaat bagi kelangsungan hutan dan kehidupan mereka di desa.(yans/sdn/humasprovkaltim)

Foto. : Masdiansyah

[#pemprov Kaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Hotel Novotel



8 Oktober 2020



Bahas PKS Pengurangan Emisi

BALIKPAPAN – Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Pemprov Kaltim melakukan pembahasan internal mengenai Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Program Pengurangan Emisi GRK melalui pelaksanaan REDD+ berbasis yuridiksi di Kalimantan Timur.

Hal ini disebutkan Perwakilan Biro Ekonomi Setda Prov Kaltim Pathur Rahman saat memimpin rapat internal Pembahasan PKS antara KLHK – Pemprov Kaltim di Ruang Meeting Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (8/10/2020).

“Hari ini kita rapat untuk pembahasan konsep PKS yang sudah disiapkan KLHK. Harapannya PKS untuk segera bersama-sama melaksanakan tugas dan ruang lingkup kerjasama para pihak terkait pelaksanaan program Pengurangan Emisi GRK melalui pelaksanaan REDD+ berbasis yuridiksi di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubbag Kerjasama Non Pemerintah Wilma Kania menjelaskan bahwa Perjanjian Kerja Sama yang diharapkan dapat memenuhi keinginan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemprov Kaltim.

"Saya berharap kerjasama ini antara KLHK dan Pemprov Kaltim bisa saling bersinergi dalam pelaksanaan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Kalimantan Timur," kata Wilma Kania.

Konsep PKS akan dibahas lebih lanjut oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim untuk penyempurnaan menyesuaikan kaidah dan hukum.

"Bila sudah sesuai akan segera dijadwalkan penandatanganan PKS," ungkapnya. (seno/yans/humasprovkaltim)

Foto. :. Adi Suseno

[#pemprov Kaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Hotel Novotel



9 Oktober 2020



FGD PKS Pengurangan Emisi GRK

BALIKPAPAN–Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemprov Kaltim melakukan pembahasan dan penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Program Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui pelaksanaan REDD+ berbasis yuridiksi di Kaltim.

Pembahasan dan penyusunan naskah tersebut digelar dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) dan dibuka oleh Kepala Biro Humas Setda Prov Kaltim HM Syafranuddin di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (09/10/2020).

“Harapan kita semua, bahwa kegiatan FGD ini dapat memberikan pendalaman, masukan serta penyempurnaan naskah Perjanjian Kerja Sama yang saya anggap sangat penting dan strategis sebagai bahan administratif dalam mendorong keberhasilan dan keberlanjutan program pengurangan emisi di Kaltim,” ujarnya.

Syafranuddin menambahkan dengan adanya naskah PKS ini dapat menjadi alat dalam upaya penurunan emisi GRK, diantaranya untuk mempersiapkan pelaksanaan program, perbaikan kebijakan dan kelembagaan, mewujudkan penerapan kerangka pengaman sosial dan lingkungan, mekanisme pembagian manfaat yang berkeadilan, serta pengukuran, pemantauan, dan pelaporan yang akuntabel juga transparan, sinkronisasi dan verifikasi data pendukung pengukuran dan pemantauan pelaksanaan penurunan emisi melalui REDD+ di Kaltim.

Dalam kegiatan FGD ini, Perwakilan P3SEKPI Danang Apriyanto menjelaskan bahwa kegiatan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Sekjen KLHK dan Gubernur Kalimantan Timur dan ditandatangani pada 11 Maret 2020 tentang Program Pengurangan Emisi GRK melalui pelaksanaan REDD+ berbasis yuridiksi di Kalimantan Timur.

"Semoga dengan adanya FGD ini nantinya akan tersedia naskah Perjanjian Kerja Sama Program Pengurangan Emisi GRK melalui pelaksanaan REDD+ berbasis yuridiksi di Kaltim sebagai pelaksana Nota Kesepahaman/MoU dan sebagai landasan hukum kerjasama antara Kementerian LHK dan Pemprov Kaltim," jelas Danang Apriyanto.

Rencananya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Pengurangan Emisi GRK melalui pelaksanaan REDD+ berbasis yuridiksi di Kalimantan Timur akan dilaksanakan pada Senin, 12 Oktober 2020.

Foto. :. Adi Suseno

[#pemprov Kaltim](#)

[#humasprov Kaltim](#)

[#infokaltim](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Anan Jaya



9 Oktober 2020



Proklamasi Plus di Desa Anan Jaya

Sosialisasi Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) dan Proklamasi Plus yang dilakukan Tim FPIC (Free, Prior, Informed, Consent) Kutai Barat 2 berlanjut di Desa Anan Jaya, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Kamis (08/10).

Desa Anan Jaya ditempuh 2,5 jam dari desa Sambung serta berada ditengah-tengah perusahaan kayu, tambang dan kebun sawit. Desa ini berkembang dari daerah transmigrasi perusahaan karet yg diberikan kepada masyarakat jika telah mengelola selama lima tahun.

Ketua Tim FPIC Kubar 2 menegaskan Proklamasi Plus dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) ini merupakan program berbasis kinerja, dimana desa nantinya akan mendapatkan kompensasi atas hasil yang dikerjakan dilapangan, yakni dari menjaga dan memelihara hutan dan lahan guna menurunkan emisi karbon.

"Sayang sekali jika Desa Anan Jaya tidak terlibat dalam program penurunan emisi gas rumah kaca melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan berbasis yuridiksi FCPF-Carbon Fund ini. Karena selain berdampak positif bagi lingkungan, desa juga akan mendapatkan kompensasi," jelasnya.

Kepala Desa Anan Jaya Radius Suyut meminta waktu untuk mempelajari isi dokumen secara utuh guna mengkoneksikan dengan program yang telah berjalan di desa.

Sosialisasi di hadir kurang lebih 30 orang peserta dari masyarakat Desa Anan Jaya dengan menerapkan protokol Kesehatan (cin/her/yans/humasprovkaltim)

Foto. : Istimewa

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)



Instagram



pemprov_kaltim

Desa Sambung



9 Oktober 2020



MPA Desa Sambung Dukung FCPF

Tim FPIC (Free, Prior, Informed, Consent) Kutai Barat 2 mengadakan Sosialisasi Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) dan Proklim Plus di Desa Sambung, Kecamatan Bentian Besar, Kutai Barat, Rabu (07/10). Kegiatan ini dalam rangka program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF).

Ketua Tim FPIC Kubar 2 Suimah yang juga menjadi salah satu pemateri menuturkan bahwa suasana desa sangat baik karena masyarakat sangat menjaga hutan dan juga bermata pencaharian dari hasil hutan dengan membuat kerajinan tikar dan rotan, serta madu.

"Kami berharap Desa Sambung akan ikut mendukung program FCPF ini," tuturnya.

Kepala Desa Sambung Kastianus menambahkan program penurunan emisi karbon ini bagus untuk masyarakat seiring telah ada upaya terutama terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan dibentuknya MPA (Masyarakat Peduli Api)

"Tidak dapat dipungkiri bahwa program ini baru kami dengar sehingga perlu waktu kami untuk memahami isi secara utuh walaupun ada sebagian masyarakat yang sudah dapat memahami. Terimakasih telah memilih Desa Sambung sebagai salah satu dari 150 desa Proklim Plus," jelasnya.

Desa Sambung memiliki lokasi yang cukup jauh dengan kondisi jalan tanah yang licin ketika habis hujan. Tidak adanya sinyal telepon selular dan jauh dari hiruk pikuk kota memiliki tantangan tersendiri bagi tim dalam melaksanakan sosialisasi. Kegiatan diadakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan dihadiri masyarakat Desa Sambung. (cin/her/yans/humasprovkaltim)

Foto. :. Istimewa

[#pemprovkaltim](#)
[#humasprovkaltim](#)
[#lawancovid19](#)
[#infokaltim](#)
[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Prayon



Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan Berbasis Yurisdiksi (Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund) di Provinsi Kalimantan Timur



9 Oktober 2020

Prayon yang Perawan

Sosialisasi dan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) sampai ke Desa Prayon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Jumat (9/10/2020).

Desa berluas 88,26 km² itu hanya berpenduduk sekitar 200 jiwa. Sementara hutan desa mereka sekitar 3/4 dari luas keseluruhan desa.

"Boleh dibilang hutan kami masih perawan pak," aku Kepala Desa Prayon, Barniah di aula desa setempat usai sosialisasi.

Setelah mendengarkan secara seksama penjelasan dari Tim Padiatapa atau Free Prior Informed Consent (FPIC) yang dipimpin Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Muhammad Syoim, Kepala Desa Prayon menyatakan sangat mendukung.

Menurut Barniah, program penurunan emisi gas rumah kaca melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan berbasis yurisdiksi (forest carbon partnership facility-carbon fund) sangat sejalan dengan kebijakan desa yang dia pimpin untuk periode ketiganya itu.

"Sebagai kepala desa saya sangat mendukung program ini. Prayon ingin terus berkontribusi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia, juga untuk dunia," tegas Barniah, diaminakan Ketua BPD Prayon, Bahrin Aqli dan Ketua Adat Desa Prayon, Goyon.

Muhammad Syoim dari FPIC dalam sosialisasi itu menyampaikan menjaga hutan agar tetap lestari dan hijau akan membantu menyelamatkan bumi.

"Mencegah deforestasi dan degradasi hutan itu, bukan hanya berarti menurunkan emisi, tapi bisa juga berarti menurunkan emosi. Menurunkan emosi untuk tidak menebang hutan secara tidak terkendali. Demi anak cucu dan bumi kita," beber Syoim.

Bersama BPD dan tokoh adat setempat, Kepala Desa Barniah bertekad untuk membuat aturan lebih tegas untuk menyelamatkan hutan desa mereka dari penebangan liar.

Selanjutnya sosialisasi Padiatapa dilanjutkan ke Desa Long Sayu, Lusan dan Suan Sulutung. Sebelumnya, sosialisasi dan Padiatapa juga dilakukan di Desa Uko. (sul/humasprov kaltim)

Foto. :. Ahmad Riyandi

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#infokaltim](#)



Instagram



pemprov_kaltim

Desa Tepian Langsung



9 Oktober 2020

FPIC Sosialisasi di Tepian Langsung

Setelah melaksanakan kegiatan di Desa Sangkima, Sangatta Selatan dan Tebangan Lembak, Tim FPIC (free prior inform concern) atau Padiatapa (Persetujuan Tanpa Paksaan atas dasar Informasi awal) melanjutkan sosialisasi program penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Program penurunan emisi melalui pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan berbasis yurisdiksi (FCPF-CF) Tahun 2020-2024 di Kaltim kali ini dilaksanakan di Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, Jumat 9 Oktober 2020.

Sosialisasi dipimpin Ketua Tim Pelaksana FPIC Padiatapa Tim Kutai Timur 1 Adi Supriadi didampingi Fasilitator/Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Balibangda Kaltim Dadang Mukhrim.

Sosialisasi dibuka Kepala Desa Tepian Langsung Zeky Hamsah dan diawali profil desa oleh Ketua BPD Kusmin. Hadir Ketua LPM Ferry Wahyudi, Wakil Adat Abdul Rahim, Kepala Dusun 1 Rabeanyah, Ketua RT 03 Masliansyah, Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh wanita, kader PKK dan warga Desa Tepian Langsung serta perusahaan.

Adi Supriadi, Dosen Politeknik Pertanian Negeri Samarinda mengingatkan dalam memelihara dan menjaga hutan harus didokumentasikan dan kegiatan harus melibatkan kaum perempuan.

Sementara Kepala Desa Tepian Langsung Zeky Hamsah mengungkapkan luas hutan desa hampir mencapai 12 ribu hektar. Melindungi dan menjaga hutan sudah menjadi kewajiban warga desanya, walau pun sebagian besar masyarakat hidup dari potensi hutan namun tidak merusak.

"Desa ini ada program unggulan, yakni Seribu Menara Karts. Selain mendata nama sungai dan gunung, juga menanam serta melestarikan tanaman lokal dengan berbagai jenis," ujarnya.

Selain 12 ribu hektar kawasan hutan lindung yang selama ini terus dijaga, pihak desa terus melakukan inventarisasi lahan-lahan atau kawasan hutan lainnya yang bisa dipertahankan dan dikembangkan desa.

Kepala Dusun 1 Rabeansyah menambahkan ada sekitar 1.000 hektar kawasan hutan lindung yang masih alami menyimpan tanaman besar jenis Ulin, Bangkirai, Meranti dan jenis lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi.(yans/sdn/humasprovkaltim)

Foto. : Masdiansyah

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Kantor Bupati Kutai Timur

-
-
-



9 Oktober 2020

Dukungan Pemerintah Daerah

Guna memastikan kelancaran kegiatan di lapangan, sekaligus menyampaikan program Tim FPIC (free prior inform concern) di Kabupaten Kutai Timur, maka Ketua Tim Pelaksana FPIC Padiatapa Tim Kutim 1 Adi Supriadi didampingi Fasilitator/Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Balibangda Kaltim Dadang Mukhrim mengunjungi Pemkab Kutim, khususnya Bagian Tata Pemerintahan.

Tim FPIC atau Padiatapa (Persetujuan Tanpa Paksaan atas dasar Informasi awal) diterima Kasubbag Administrasi Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kutai Timur Vita Nurhasanah.

Pada dasarnya menurut Vita, surat dan informasi yang disampaikan Tim FPIC Kutim 1 akan segera disampaikan ke pimpinan hingga Pjs Bupati Kutim Dr Jauhar Efendi. Atas sambutan itu, Fasilitator/Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Balibangda Kaltim Dadang Mukhrim mengemukakan apresiasi atas komitmen Pemkab Kutim dalam mendukung kegiatan FCPC-CF di desa-desa.

"Dari 150 desa di Kaltim yang masuk program FCPF-CF, khusus Kutim ini kan ada 20 desa. Dan kita dari Tim FPIC melakukan sosialisasi ke desa-desa itu," jelas Dadang. Surat pemberitahuan lanjutnya, sangat penting disampaikan ke pihak terkait. Selain, bentuk koordinasi juga dukungan pemerintah daerah setempat menyukseskan program nasional di daerah.

Selain itu, koordinasi Tim FPIC tentu sangat positif. Dimana, ketika pihak-pihak memerlukan data dan informasi guna mendukung sosialisasi di tingkat lapang, maka pemerintah daerah setempat segera memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Menurut Dadang, program FCPF bersama World Bank dan negara-negara donatur sangat strategis dalam upaya melindungi hutan yang tersebar di desa-desa. Sekaligus memotivasi masyarakat untuk berperan aktif memelihara hutan di desa mereka.

"Selain, kita mendapat keuntungan finansial dari Bank Dunia. Juga, pemberdayaan masyarakat lebih aktif mengembangkan kegiatan-kegiatan bernilai ekonomi tapi hutan tidak rusak sebab tetap terjaga dan terpelihara," ungkapnya. (yans/sdn/humasprovkaltim)

Foto. : Masdiansyah

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Sembuan

-
-
-



9 Oktober 2020



Sembuan Siap Sukseskan FCPF

Tim FPIC (Free, Prior, Informed, Consent) Kutai Barat 2 kembali mengadakan Sosialisasi Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) dan Proklamasi Plus. Kali ini menyambangi Desa Sembuan, Kecamatan Nyuatan, Kutai Barat. Sosialisasi berlangsung di Kantor Kepala Kampung Sembuan, pada jumat (9/10).

Sosialisasi Program Kampung Iklim + dan Padiatapa dalam rangka program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) ini dibuka oleh Kepala Kampung Sembuan Jersinius.

"Kami berharap agar aparaturnya dan masyarakat Desa Sembuan dapat didampingi dalam proses program penurunan emisi gas rumah kaca ini," ujar Jersinius sembari mengapresiasi program nasional melalui kolaborasi pusat dan daerah ini.

Ketua Tim FPIC Wilayah Kubar 2 Suimah menambahkan Sosialisasi Program Kampung Iklim Plus dan Padiatapa ini disambut positif warga hingga melebihi kapasitas peserta.

"Sesuai dengan tujuan sosialisasi ini untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta upaya mitigasi dan adaptasi akibat dampak perubahan iklim, selain itu juga melalui kegiatan ini nantinya akan dilakukan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan," jelasnya.

Desa Sembuan memiliki hutan desa seluas 2.835 hektare melalui SK Kemenhut Tahun 2015 dan hutan adat yang semula diusulkan 27.000 hektare. Kemudian setelah dua kali direvisi hingga tersisa 9.000 hektare yang sedang menunggu Surat Keputusan Menteri Kehutanan.

Kegiatan ini diikuti peserta sebanyak 50 Orang yang berasal dari unsur Kepala BPK, LPHD, PKK, kepala adat, tokoh masyarakat, pengurus BUMDes, kelompok tani, karang taruna, ketua RT dan pendamping desa dari P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kutai Barat, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. (cin/her/yans/humasprovkaltim)

Foto. : Istimewa

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Nehes Liah Bing



9 Oktober 2020



Padiatapa di Nehes Liah Bing

Kegiatan Sosialisasi Program Kampung Iklim Plus (Proklam +) dan Padiatapa di Desa Long Wehea berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Desa Nehes Liah Bing Jumat (9/10/2020) dibuka Kepala Desa Nehes Liah Bing Kristian Hasmadi.

Kegiatan diikuti 35 peserta terdiri Kepala BPD, LPM, PKK, kepala adat, tokoh masyarakat, pengurus BUMDes, kelompok tani, karang taruna dan pendamping lokal desa.

"Sosialisasi Proklam Plus dan Padiatapa ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta upaya mitigasi dan adaptasi akibat dampak perubahan iklim. Melalui kegiatan ini akan dilakukan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan," kata Ketua Tim FPIC Wilayah Kutim 2 Monica Kusneti.

Kepala Desa Nehes Liah Bing Kristian Hasmadi menyambut baik atas upaya Pemprov Kaltim melaksanakan kegiatan Proklam di desanya. Ia pun berharap program ini tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi berkelanjutan. Sehingga kampungnya maju dan berkembang dengan metode pembangunan yang berbasis lingkungan.

"Bagi peserta agar mengikuti sosialisasi hingga selesai, sehingga informasi yang disampaikan dapat dimengerti dan diaplikasikan. Sehingga apa yang akan diprogramkan oleh desa bisa bersinegri dengan program ini," pesan Kristian. (cin/yans/humasprovkaltim)

Foto. : Istimewa

[#pemprovkaltim](#)
[#humasprovkaltim](#)
[#lawancovid19](#)
[#infokaltim](#)
[#indonesia](#)



Instagram



pemprov_kaltim

Desa Pereng Taliq



10 Oktober 2020



200 Hektare di Pereng Taliq

Tim FPIC (Free, Prior, Informed, Consent) Kutai Barat 3 mengadakan Sosialisasi Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) dan Proklamasi plus dalam rangka program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) di Kampung Pereng Taliq yang menjadi salah satu dari enam desa terpilih program kampung iklim plus di Kecamatan Bongan, Kutai Barat, Sabtu (10/10/2020).

Sosialisasi dibuka oleh Petinggi Kampung Pereng Taliq Agus Salim yang menyatakan kampungnya siap mendukung program FCPF.

"Kami sangat berterima kasih menjadi salah satu yang terpilih. Pereng Taliq merupakan kampung terluas di Kecamatan Bongan dan siap mencadangkan lahan sekitar 200 hektare untuk digunakan Kampung Iklim Plus," sebut Agus Salim.

Wakil Ketua Adat Musni menambahkan program ini sangat bagus untuk mengurangi pembukaan lahan secara besar-besaran.

"Masyarakat Kampung Pereng Taliq memiliki ladang yang berpidah-pindah. Karenanya, kami berharap program ini dapat memanfaatkan bekas ladang yang tak terpakai lagi," jelasnya.

Sementara, Ketua Tim FPIC Kubar 3 Rahajo Ari optimis program FCPF di Kampung Pereng Taliq berjalan dengan baik setelah melihat antusias yang tinggi dari masyarakat dalam mendukung program ini.

Kegiatan diikuti 45 peserta dari masyarakat Kampung Pereng Taliq dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. (cin/yans/humasprovkaltim)

Foto. ∴ Fathur Al _ Qadrie

[#pemprov_kaltim](#)
[#humasprovkaltim](#)
[#lawancovid19](#)
[#infokaltim](#)
[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Karangany Dalam



10 Oktober 2020



Nilai Kearifan Lokal

Sosialisasi dan Pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pencegahan Deforestasi Dan Degradasi Hutan Berbasis Yurisdiksi (FCPF-Carbon Fund) di Provinsi Kalimantan Timur terus berlanjut.

Kali ini Desa Karangany Dalam Kecamatan Karangany Kabupaten Kutai Timur menjadi sasaran Tim FPIC bersosialisasi dan diikuti 40 peserta dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, Sabtu (10/10/2020)

Kegiatan dibuka Kepala Desa Karangany Dalam Ridwan dipusatkan di kantor desa. Dilanjutkan paparan Ketua Tim Pelaksana FPIC/Padiatapa Kutai Timur 1 Adi Supriadi bersama Fasilitator/Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Balibangda Kaltim Dadang Mukhrim.

Kades Ridwan menyebutkan desanya memiliki luasan 72.000 hektar, sesudah dimekarkan kecamatan sendiri dan terpisah dari Berau, mereka memiliki hutan produksi non kayu dan hutan lindung 9.000 Ha, terdiri 3.000 Ha KBNK dan 6.000 Ha hutan lindung.

"Menjaga dan memelihara hutan sudah kami lakukan turun temurun. Hutan bagian hidup warga disini. Jadi sosialisasi program ini menambah pemahaman masyarakat atas konsep pentingnya mempertahankan hutan sebagai paru-paru dunia," ujar Ridwan.

Ketua Tim FPIC Kutim 1 yang juga Dosen Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Adi Supriadi mengakui masalah manfaat hutan, warga desa lebih paham. Hal ini bisa dilihat dari kualitas air sungai, berburu, musim buah, musim tani, dan budaya mereka.

"Ini lah yang kita sebut nilai-nilai kearifan lokal warga Karangany Dalam. Menjaga dan memelihara hutan bagian hidup mereka. Program ini sudah dilakukan secara baik, hanya kurang dalam pelaporan dan dokumentasi," ujar Adi.

Menurut dia, kenapa masyarakat harus mempertahankan hutan. Maka, yang lebih mengetahui dan memahaminya adalah warga desa ini sendiri. Namun, terlihat sikap dan perilaku mereka terhadap hutan, menunjukkan nilai-nilai kearifan warga setempat.

Sosialisasi dihadiri unsur BPD, LPM, kader PKK, BUMDes, kelompok wanita, karang taruna, tokoh adat, kepala dusun dan pemangku adat Desa Karangany Dalam. (yans/sdn/humasprovkaltim)

Foto. : Masdiansyah

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Intu Lingau



10 Oktober 2020



Hutan Desa Buring Ngayuh

Pelaksanaan Sosialisasi Kampung Iklim Plus pada Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan Berbasis Yuridiksi (FPCF-Carbon Fund) di Provinsi Kaltim berlanjut di Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, Sabtu (10/10).

Sosialisasi dilaksanakan di Balai Pertemuan Umum Kampung Intu Lingau dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19

Ketua Tim Kubar 2 Suimah sangat berharap keikutsertaan Kampung Intu Lingau mengingat kampung memiliki hutan desa Buring Ngayuh yang cukup luas yaitu 8.531 hektare.

Kegiatan ini sukses juga tak lepas dari peran para anggota Tim FPIC Kubar 2 yakni Achmad Sopian, Wahyu Dwi Hidayat dan Afriady Darung.

Kepala Kampung Intu Lingau Abed Nego menyatakan kampungnya memiliki kearifan lokal dalam membuka ladang dengan membakar disertai penjagaan yang ketat dari masyarakat sendiri.

"Kita juga memiliki potensi wisata alam yang sangat banyak dan berpencair namun belum sempat dikelola," jelasnya.

Kegiatan sosialisasi ini mendapat sambutan baik dari masyarakat demi mengetahui program ini. Dihadiri 40 peserta, meskipun saat ini adalah musim menugal. (cin/yans/humasprovkaltim).

Foto. : Istimewa

[#pemprov_kaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)



Instagram



pemprov_kaltim

Desa Batu Lepoq



11 Oktober 2020



Tanah Adat Dukung Proklim

Desa Batu Lepoq kali ini menjadi sasaran Tim Kutim 1 melaksanakan Sosialisasi dan Pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pencegahan Deforestasi Dan Degradasi Hutan Berbasis Yurisdiksi (FCPF-Carbon Fund) di Provinsi Kalimantan Timur.

Desa yang berada di Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur ini, ternyata memiliki potensi besar kawasan hutan dan dijaga secara baik oleh pemangku adat, masyarakat dan unsur pemerintahan desa.

Disebutkan Kepala Adat Batu Lepoq Ahmad Tanjangan bahwa hutan yang mereka jaga dan lindungi tidak kurang 1.600 hektar, terdiri tanah adat seluas 700 hektar dan hutan desa 900 hektar.

"Dukungan dan perhatian pemerintah sangat diperlukan agar kami disini tetap bisa mempertahankan hutan desa ini," ujar pria yang biasa dipanggil Adam ini saat sosialisasi di Balai Pertemuan Desa Batu Lepoq, Minggu (11/10/2020).

Hal senada diungkapkan tokoh masyarakat Desa Batu Lepoq Ningdum bahwa berbagai kegiatan mereka lakukan demi mempertahankan dan pelestarian hutan untuk kesejahteraan dan kehidupan masyarakat.

"Kami merancang hutan adat dan hutan desa, pengembangan kawasan wisata. Dan kawasan APL, terdiri tiga kawasan, diantaranya 350 hektar untuk kegiatan kebun dan peternakan dikelola BUMDes," jelasnya.

Sementara Sekretaris Desa Batu Lepoq Nurul Yatim menyambut baik atas kehadiran Tim FPIC, sehingga masyarakat desanya bertambah yakin apa yang dilakukan dan dipertahankan selama ini sudah benar dan bermanfaat positif.

Ketua Tim Pelaksana FPIC/Padiatapa Kutai Timur 1 Adi Supriadi bersama Fasilitator/Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Balibangda Kaltim Dadang Mukhrim meyakinkan warga Desa Batu Lepoq bahwa negara-negara donatur melalui World Bank sangat menghargai upaya pihak-pihak dalam mempertahankan dan melestarikan hutannya.

"Negara donatur melalui Bank Dunia berkomitmen membantu negara yang masih memiliki hutan dalam bentuk donasi," ujar Adi Supriadi menyemangati warga desa. (yans/sdn/humasprovkaltim)

Foto. : Masdiansyah

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Lakan Bilem



12 Oktober 2020



FPIC ke Lakan Bilem

Sosialisasi Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) dan Proklamasi Plus kembali diadakan Tim FPIC (Free, Prior, Informed, Consent) Kutai Barat 2 yang kali ini diadakan di Kampung Lakan Bilem, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Senin (12/10/2020).

Desa seluas 81,10 Km2 sesuai Perda Kubar No. 14 tahun 2003 tentang Pembentukan Kampung Lakan Bilem dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, yaitu 373 jiwa. Usulan luas hutan desa + 3.063,95 Ha dan telah dibentuk lembaga pengelola hutan desa (LPHD) sesuai Perdes 10/2018.

Kepala Kampung Lakan Bilem Yosianus Moja mengatakan Pemerintah Kampung Lakan Bilem sangat menyambut baik dan mendukung penuh program ini.

Yosianus menjelaskan Kampung Lakan Bilem merupakan kampung yang kaya akan wisata alam yang dikelola Pemerintah Desa dan masyarakat.

Potensi desa ada Air Terjun Sungai Lakan untuk arung jeram, wisata alam hutan, Wisata embun Gunung S dan paralayang. Juga Air Terjun Sungai Namuq Pangerant, Goa Kelelawar dan gunung Jewawiq masih belum dikembangkan.

Pernyataan ini pun dipertegas oleh Ketua BPK Kampung Lakan Bilem bahwa bahwa hutan desa masih asli. Sedangkan pengelolaannya, Pemerintah Kampung bekerjasama dengan masyarakat.

Sementara Ketua tim sosialisasi Kubar 2 Suimah menambahkan Kampung Lakan Bilem telah melakukan upaya mitigasi dengan adanya Peraturan kampung No.14 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah.

Termasuk, komitmen mengalokasikan sebagian dana desa sebesar 50 juta pada tahun 2019 untuk kegiatan penanaman. Namun belum terealisasi, karena dana dialihkan untuk penanganan selama masa Pandemi Covid-19.

Sosialisasi FPIC disambut baik masyarakat setempat yang terlihat sangat antusias mengikuti acara dengan tetap menjaga protokol kesehatan Covid-19.(cin/yans/humasprovkaltim)

Foto. : Istimewa

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Pemaluan

-
-
-



13 Oktober 2020



FCPF-CF ke Desa Pemaluan

Sosialisasi dan Pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pencegahan Deforestasi Dan Degradasi Hutan Berbasis Yurisdiksi (FCPF-Carbon Fund) di Provinsi Kalimantan Timur terus berlanjut.

Kali ini Desa Pemaluan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi sasaran Tim FPIC bersosialisasi dan diikuti 40 peserta menerapkan protokol kesehatan Covid-19, Selasa (13/10/2020)

Kegiatan dibuka Lurah Pemaluan Ari Rahayu Purwati dipusatkan di Kantor Lurah. Dilanjutkan paparan Ketua Tim Pelaksana FPIC/Padiatapa PPU Rahmina bersama Tim.

Lurah Ari menyebutkan desanya memiliki luasan 2.349,28 hektar dengan jumlah penduduk 1.539 jiwa. Mereka memiliki luas tanah 700 ha.

"Hutan disini masih banyak tapi semua masih dalam konsesi perusahaan (hutan industri). Desa Pemaluan juga memiliki beberapa kawasan wisata, seperti air terjun dan Menara Soedarmono," kata Ari.

Dia berharap setelah sosialisasi ini, maka masyarakat bisa memahami betapa pentingnya hutan sebagai paru-paru dunia.

Ketua Tim Pelaksana FPIC/Padiatapa PPU Rahmina mengatakan Program Penurunan Emisi akan menjawab deforestasi dan degradasi hutan dengan menasar pada penyebab utama dari lemahnya tata kelola melalui reformasi kebijakan.

"Kolaborasi dengan perusahaan perkebunan dan kehutanan, serta penguatan masyarakat lokal/adat," ujar Rahmina.

Sosialisasi dihadiri unsur BPD, LPM, kader PKK, BUMDes, kelompok wanita, guru, karang taruna, tokoh adat, kepala dusun dan pemangku adat Desa Pemaluan. (vv/yans/humasprovkaltim)

Foto : Yunita Indrasari

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)



Instagram



pemprov_kaltim

Kelurahan Riko

-
-
-



14 Oktober 2020



Sosialisasi di Kelurahan Riko

Pelaksanaan Sosialisasi Kampung Iklim Plus pada Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan Berbasis Yuridiksi (FPCF-Carbon Fund) di Provinsi Kaltim berlanjut di Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu (14/10/2020).

Kegiatan dibuka Sekretaris Lurah Riko Drs Mudin. Menyatakan menyambut baik atas kehadiran Tim FPIC, sehingga masyarakat desanya bertambah yakin apa yang dilakukan dan dipertahankan selama ini sudah benar dan bermanfaat positif.

Sosialisasi/paparan Ketua Tim Pelaksana FPIC/Padiatapa PPU Rahmina bersama Tim dilaksanakan di Balai Pertemuan Kelurahan Riko diikuti 40 peserta dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Kita memiliki hutan yang sangat luas sehingga bagus untuk oksigen seluruh dunia. Penting bagi kita menjaga dan melindunginya. Tanpa hutan kita tidak bisa menghirup udara yang sehat” jelasnya.

Hal yang serupa juga diungkapkan tokoh masyarakat Kelurahan Riko bahwa berbagai kegiatan meraka lakukan demi mempertahankan dan melestarikan hutan. Agar terhindar dari musibah banjir dan pembalakan liar.

Sosialisasi dihadiri unsur BPD, LPM, kader PKK, BUMDes, kelompok wanita, guru, karang taruna, tokoh adat, kepala dusun dan pemangku adat Desa Riko. (vv/yans/humasprovkaltim)

Foto : Yuvita Indrasari

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Bermai



14 Oktober 2020



155 Hektar Hutan Bermai

Sosialisasi dan pelaksanaan Padiatapa/FPIC (Free, Prior, Informed and Consent) dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan berbasis Yuridiksi (FPCF-Carbon Fund) di Kalimantan Timur terus digencarkan.

Salah satunya, Tim FPIC Kubar 2 di Kampung Bermai, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Rabu (14/10/2020).

Kepala Kampung Bermai Agustinus menuturkan banyak kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan, beberapa diantaranya pembagian bibit rambutan dan sengon dari NGO.

Sementara Kepala Adat Kampung Bermai Yupendi menambahkan kampungnya belum memiliki hutan adat dan hukum adat diterapkan dalam segala hal termasuk dalam pengelolaan lingkungan.

Tim FPIC Kubar 2 yang diketuai Suimah beserta tim mendapatkan sambutan baik Kepala Kampung dan masyarakat, dimana pada akhir sosialisasi berkomitmen akan mendukung program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan di hutan Desa Bermai seluas 155 hektar dengan dukungan pendanaan dari Dana Desa. (cin/yans/humasprovkaltim)

Foto : Istimewa

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Teluk Sumbang



16 Oktober 2020



Teluk Sumbang Sambut FCPF

Sosialisasi dan pelaksanaan Padiatapa/FPIC (Free, Prior, Informed, Consent) dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan berbasis Yurisdiksi (FPCF-Carbon Fund) di Provinsi Kalimantan Timur bergeser ke wilayah utara Benua Etam, tepatnya di Kampung Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau.

Bertempat di Kantor Kepala Kampung Teluk Sumbang, sosialisasi dibuka oleh Kepala Kampung Kamaruddin pada Jum'at (16/10/2020). Dia menyatakan sudah sangat berharap dan antusias akan program FCPF-Carbon Fund melalui Program Kampung Iklim Plus (Proklam+).

"Alhamdulillah Kampung Teluk Sumbang, daerah pesisir Berau termasuk dalam delapan kampung terpilih menjadi kampung iklim plus. Sangat sayang dilewatkan dan siap menyiapkan lahan berapa pun yang diperlukan untuk program ini," jelas Kamaruddin.

Ketua Tim FPIC Berau 4 (Tri Budi) menambahkan mengaku optimis Proklam+ berjalan dengan baik ketika melihat dan merasakan antusias masyarakat Kampung Teluk Sumbang, meskipun keputusan untuk bergabung belum diambil.

"Kita harus senang jika ada yang akan membawa perubahan apalagi perubahan baik termasuk di Kampung Teluk Sumbang ini," ujarnya.

Kampung Teluk Sumbang dapat ditempuh melalui jalur darat dari Tanjung Redeb, ibu kota Kabupaten Berau selama hampir 10 jam perjalanan. Melewati Desa Semurut, Biatan Ilir, Tembudan, Batu Putih, Biduk-Biduk, Teluk Sulaiman dan Giring-Giring yang juga terpilih masuk Proklam+.

Luas Kampung Teluk Sumbang kurang dari 10.000 hektare dengan jumlah penduduk 850 jiwa (243 KK) dan termasuk kampung literasi yang bercampurnya suku Basap dan Suku Pesisir Bugis, Bajau dan Kaili bersama-sama hidup rukun damai. Ekosistem yang lengkap terlihat dari gunung, mangrove (bakau) dan pulau.

Sosialisasi dilaksanakan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dihadiri masyarakat, kelompok nelayan, kelompok tani, Badan Perwakilan Kampung (BPK), PKK Ketua Adat, Ketua Badan Usaha Milik Kampung, tokoh masyarakat dan Karang Taruna. (cin/yans/humasprovkaltim)

Foto : Ahmad Riyandi

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#infokaltim](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Merasa



17 Oktober 2020



Merasa Dukung FCPF-Carbon Fund

Sosialisasi dan Pelaksanaan Padiatapa/FPIC dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan berbasis Yurisdiksi (FPCF-Carbon Fund) di Provinsi Kalimantan Timur terus di gencarkan. Tim FPIC terus mendatanfi ke desa-desa yang terpilih menjadi masuk Program Kampung Iklim Plus (Proklam+), salah satunya Kampung Merasa, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Jumat (16/10).

Kampung Merasa ditempuh dengan waktu 90 menit dari Tanjung Redeb, ibu kota Kabupaten Berau melalui jalur darat. Memiliki 5 RT (rukun tetangga) dengan jumlah penduduk 940 Jiwa dari 322 KK (kepala keluarga).

Ketua Tim FPIC Berau 1 Muhamad Teguh Satria, mengatakan sosialisasi mendapat respon positif dari warga Merasa. Terlihat dari antusias warga dalam menyimak kegiatan sosialisasi.

"Sosialisasi berjalan dengan lancar, peserta sangat antusias dalam berdiskusi. Warga tidak hanya bertanya tetapi juga memberikan kisah pengalaman mereka selama proses menjaga dan memanfaatkan kawasan hutan di Kampung Merasa," jelasnya.

Kepala Kampung Merasa, Yafet, menegaskan dirinya beserta warga kampung sangat mendukung program FCPF-Carbon Fund.

"Kami mendukung program ini sebab sebelumnya kami sudah mengikuti sosialisasinya hingga ke Jakarta. Pada prinsipnya kami siap menjaga hutan sebagaimana para pendahulu demi masa depan anak cucu kami di Kampung Merasa," tegas Yafet.

Sosialisasi dilaksanakan dengan melakukan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan jumlah peserta 30 orang.

Foto : Istimewa

[#pemprovkaltim](#)
[#humasprovkaltim](#)
[#lawancovid19](#)
[#infokaltim](#)
[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Batu Putih



17 Oktober 2020



Kampung Batu Putih Siapkan 3.000 Hektare Hutan Mangrove

Kampung Batu Putih yang terletak di Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau dengan menempuh kurang lebih lima jam perjalanan darat dari ibu kota Berau Tanjung Redeb memiliki hutan mangrove (bakau) yang luas.

Inilah yang menjadi salah satu alasan Kampung Batu Putih terpilih sebagai wadah dilaksanakannya Sosialisasi dan Pelaksanaan Padiatapa/FPIC (Free, Prior, Informed, Consent) dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan berbasis Yurisdiksi (FPCF-Carbon Fund) di Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (17/10).

Ketua Tim FPIC Berau 4 Tri Budi mengharapkan masyarakat Kampung Batu Putih dapat menerima dan memahami sosialisasi yang disampaikan oleh nara sumber.

Disisi lain, Kepala Kampung Batu Putih H Krisdiyanto mengungkapkan luas wilayah hutan mangrove di kampungnya adalah 3.000 hektare.

"Sangat bersyukur dipilih menjadi salah satu kampung iklim plus dan kedepannya program ini juga diharapkan dapat melibatkan masyarakat untuk membuat lapang pekerjaan dan Batu Putih siap menyediakan lahan mangrove 3.000 hektare untuk proiklim plus," jelasnya.

Dukungan juga datang dari Ketua LPM Kampung Batu Putih Asrunsyah. Dia menyatakan dukungan dan berpendapat bahwa program FCPF itu ekonomis serta tereduksi dengan program pembangunan kampung karena akan menjadi cikal bakal kelangsungan Kampung Batu Putih

Sosialisasi dilaksanakan di aula Kantor Kampung Batu Putih dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid'19 dan di hadiri 30 peserta dari berbagai unsur masyarakat Kampung Batu Putih. (cin/her/yans/humasprovkaltim)

Foto : @ahmadriyandi

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Karang Seberang



19 Oktober 2020



Dukung Tanpa Dipaksa

Desa Karang Seberang kali ini menjadi sasaran Tim Kutim 1 melaksanakan Sosialisasi dan Pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pencegahan Deforestasi Dan Degradasi Hutan Berbasis Yurisdiksi (FCPF-Carbon Fund) di Provinsi Kalimantan Timur.

Sosialisasi FPIC di desa di Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur diikuti 30 warga menerapkan protokol Covid-19. Desa ini ternyata memiliki kawasan hutan potensial dan dijaga secara baik oleh masyarakat dan unsur pemerintahan desa.

Pj Kepala Desa Karang Seberang Ahmad Muzaid saat membuka kegiatan mengatakan program FCPF dan Proklam sangat baik, sebab mendukung pemerintahan desa dalam merencanakan pembangunan dan tata ruang desa terutama perlindungan hutan desa.

"Hutan selalu kami jaga. Kami beserta seluruh warga desa siap ikut dan mendukung program ini," kata Ahmad Muzaid di Ruang Pertemuan Kantor Desa Karang Seberang, Senin (19/10/2020).

Menurut dia, tata kelola, perlindungan dan pemeliharaan hutan sudah dilakukan warga Desa Karang Seberang. Bahkan sebagian masyarakat hidupnya masih ketergantungan dengan hutan.

"Mereka mencari rotan, gaharu, rempah-rempah untuk obat tradisional. Harapannya, pemerintah meningkatkan kapasitas masyarakat disini, sehingga program Proklam dan FCPF berjalan lebih baik di desa kami," ungkapnya.

Ketua Tim Pelaksana FPIC/Padiatapa Kutai Timur 1 Adi Supriadi bersama Fasilitator/Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Balibangda Kaltim Dadang Mukhrim meyakinkan warga Desa Karang Seberang bahwa Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pencegahan Deforestasi Dan Degradasi Hutan sangat positif bagi masyarakat dan desa.

"Selain warga desa tetap bisa terus mempertahankan dan melestarikan hutannya. Negara-negara donatur melalui World Bank akan memberikan semacam dana atas upaya terhadap hutan," jelas Adi.(yans/sdn/humasprovkaltim)

Foto : Istimewa

[#pemprovkaltim](#)
[#humasprovkaltim](#)
[#lawancovid19](#)
[#infokaltim](#)
[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Kelurahan Mentawir

-
-
-



19 Oktober 2020



Mentawir Dukung Proklamasi

SEPAKU - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama Pemprov Kaltim dan FCPF-CF menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pencegahan Deforestasi Dan Degradasi Hutan Berbasis Yurisdiksi (FCPF-Carbon Fund) di Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kaltim.

"Walaupun sosialisasi Padiatapa/FPIC pertama kali disini, namun pada prinsipnya Mentawir dalam pembangunan (RPJM, RPJP, RTR) sangat mendukung dan siap bersinergi penurunan emisi GRK," tegas Lurah Mentawir M Yamani saat membuka sosialisasi di Gedung Serba Guna Kelurahan Mentawir, Senin (19/10/2020).

Yamani mengatakan dukungan program ini bukan tanpa alasan. Karena Kelurahan Mentawir yang memiliki luas wilayah 22.222 hektar dan 30 persen (6.666, 6 hektar) ditumbuhi hutan mangrove (hutan bakau) yang sebelumnya sudah dijaga dan dipelihara masyarakat Mentawir.

"Kami sangat ketat menjaga dan memelihara hutan mangrove. Sebab keberadaannya memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian masyarakat," paparnya.

Yamani juga memberikan saran dan rekomendasi untuk aspek peningkatan SDM kepada putra-putri lokal untuk dapat belajar sampai pada tingkat fakultas kehutanan, sehingga mereka memiliki wawasan terhadap lingkungannya.

"Para stakeholders bisa membuka kesempatan Diklat yang bersertifikat, sehingga mereka memiliki skill dan adaptasi efektif terhadap lingkungannya," pesan Yamani.

Sementara, Ketua Tim FPIC Wilayah Balikpapan - PPU Rahmina menjelaskan sosialisasi guna memastikan masyarakat memahami dan mengetahui apa FCPF-Carbon Fund, apa dampaknya dan konsekwensinya serta mengapa masyarakat perlu terlibat.

Rahmina berharap masyarakat maksimal memahami informasi terkait FCPF-Carbon Fund ini dan bersedia terlibat aktif (berpartisipasi) untuk berkontribusi menurunkan emisi GRK di Kaltim, khususnya di Kelurahan Mentawir. (mar/yans/humasprovkaltim)

Foto : Umar

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)



Instagram



pemprov_kaltim

Kelurahan Mentawir



20 Oktober 2020

13 Tim ke 99 Desa

SEPAKU - Pandemi Covid-19 tidak menurunkan semangat Tim FPIC Kaltim yang berjumlah 23 tim untuk melakukan Sosialisasi dan Pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pencegahan Deforestasi Dan Degradasi Hutan Berbasis Yurisdiksi (FCPF-Carbon Fund) di 99 desa dan kelurahan di Kaltim dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Ketua Tim FPIC Wilayah Balikpapan - PPU Rahmina menjelaskan tim yang dipimpinnya melaksanakan sosialisasi pada lima kelurahan di wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU).

"Untuk wilayah Balikpapan di Kelurahan Kariangau dan Margasari. Kabupaten PPU di Kecamatan Babulu (Kelurahan Pemaluan dan Mentawir) dan Kecamatan Panajam di Kelurahan Rico. Alhamdulillah semuanya sudah dilaksanakan dan terakhir di Kelurahan Mentawir ini," kata Rahmina dihadapan 50 peserta sosialisasi terdiri ketua RT, Ketua Pokdarwis, ketua LPM, tokoh adat, perwakilan PKK, karang taruna, tokoh masyarakat, kelompok tani hutan, Pokmaswas, Pokdakan, Gapoktan, serta masyarakat di Ruang Serbaguna Kelurahan Mentawir, Senin (19/10/2020).

Rahmina menambahkan tugas Tim FPIC menjelaskan dan mensosialisasikan kepada masyarakat program FCPF - Carbon Fund. Dimana, program ini sudah disosialisasikan di Kabupaten Berau, Kubar, Kutim, Paser, PPU, Kukar dan Balikpapan.

"Kegiatan sosialisasi Padiatapa/FPIC seharusnya dilaksanakan awal tahun 2020, karena pandemi Covid-19 maka mundur di akhir tahun. Seperti sekarang ini," paparnya.

Rahmina mengharapkan masyarakat memahami FCPF-Carbon Fund, bersedia terlibat aktif dan berpartisipasi menurunkan emisi gas rumah kaca di Kaltim, khususnya di Kelurahan Mentawir.

Dijelaskan, program akan mengembangkan pedoman dan peraturan untuk mengintegrasikan kegiatan REFD+ ke dalam perencanaan tata ruang desa.

"Program akan membangun kapasitas dan keterampilan lembaga desa untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan rendah emisi kedalam rencana pembangunan desa," ujar Rahmina.(mar/yans/humasprov kaltim)

Foto : Umar

[#pemprov Kaltim](#)

[#humasprov Kaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)



Instagram



pemprov_kaltim

Kota Samarinda

-
-
-



24 Oktober 2020

Penghargaan Proklamasi Nasional

SAMARINDA - Setelah meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara nasional, Provinsi Kaltim kembali meraih trophy penghargaan Program Kampung Iklim (Proklamasi) Tahun 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Penghargaan diberikan kepada Kota Tepian yang diterima Pemkot Samarinda secara simbolis oleh Sekkot Samarinda Sugeng Chairuddin melalui virtual zoom dari Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Jumat (23/10/2020).

Kegiatan bertema Deklarasi Proklamasi Aksi Bersama Pengendalian Perubahan Iklim Tingkat Tapak, Pemprov Kaltim melalui Dinas Lingkungan Hidup mengapresiasi dan sangat bangga atas kerja keras Pemerintah Kota Samarinda dalam membina Calon Kampung Iklim hingga mengantarkan pada puncaknya meraih Penghargaan Tingkat Nasional sebagai peraih Trophy Proklamasi Tahun 2020.

"Ini menjadi contoh bagi kabupaten dan kota yang lainnya di Kaltim," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim Ence Ahmad Rafiddin Rizal, Jumat (23/10/2020) malam.

Rizal sapaan Ence Ahmad Rafiddin Rizal mengatakan, ada dua lokasi yang diajukan Kota Samarinda sebagai Kampung Iklim yaitu Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Pulau Atas.

"Kelurahan Sambutan mendapatkan Trophy dan Kelurahan Pulau atas mendapatkan Sertifikat," ujarnya.

Sementara ada tiga lokasi calon Kampung Iklim yang lolos untuk Provinsi Kaltim yang diverifikasi lapangan oleh KLHK dan didampingi DLH Kaltim bersama DLH setempat pada September lalu, yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang.

"Ketiga kota sebagai Proklamasi Utama, dan yang mendapat Trophy hanya Kota Samarinda. Untuk Kota Balikpapan dan Kota Bontang mendapatkan Sertifikat," jelasnya.(jay/yans/humasprovkaltim)

Foto : Adi Suseno

- [#pemprovkaltim](#)
- [#humasprovkaltim](#)
- [#lawancovid19](#)
- [#infokaltim](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Kelurahan Mentawir

-
-
-



25 Oktober 2020



Mangrove Lambung Kehidupan

Mangrove sebagai ekosistem terpenting yang berada di antara zona laut dan pesisir memiliki keanekaragaman hayati yang paling tinggi. Mangrove merupakan lambung kehidupan masyarakat pesisir karena memiliki nilai ekonomis tinggi dan jutaan manfaat untuk kehidupan.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tiram Tambun Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Lamale saat mengajak Tim FPIC Kaltim Wilayah Balikpapan dan PPU Rahmina untuk melihat langsung hutan mangrove (bakau) yang ada Mentawir.

Lamale mengatakan kesadaran warga Mentawir untuk menjaga hutan mangrove tidak perlu diragukan lagi.

"Hutan mangrove ini akan selalu kami jaga dan pelihara. Sejak dulu hingga sekarang sudah menjadi sumber penghidupan. Kami ingin mangrove tetap menjadi rumah yang nyaman bagi berbagai jenis ikan dan kepiting, serta satwa lainnya," kata Lamale.

Ditambahkan, secara sosial ekonomi, mangrove memiliki nilai ekonomi dari kayu, buah maupun berbagai biota didalamnya. Sementara itu, dari sisi lingkungan hidup, mangrove memiliki peran sebagai benteng alami daratan dari terjangan abrasi pantai dan flora faunanya memiliki nilai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.

"Kearifan lokal warga Mentawir dalam menjaga hutan Mangrove (bakau) sudah dilaksanakan termasuk kesadaran mereka untuk menjaganya," tandasnya.

Lamale yang juga Ketua RT 1 Kelurahan Mentawir ini menjelaskan hutan mangrove yang saat ini mereka kelola seluas 500 hektar. Ratusan warga dua RT di kawasan itu pun kompak menjaga mangrove.

"Dari buah mangrove itu setidaknya ada tiga jenis produk olahan yang saat ini menjadi sumber penghasilan warga Mentawir. Yaitu produk sirup dan dodol mangrove serta produk lainnya," ujarnya. (mar/yans/humasprovkaltim)

Foto : Umar

[#pemprov Kaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Hotel Mercure Samarinda

-
-
-



3 November 2020



Monev FPIC

SAMARINDA – Kegiatan tahap pertama 13 tim FPIC (Free, Prior and Informed Consent) dalam Padiatapa program penurunan emisi FCPF-CF (Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund) dilaksanakan di 99 desa pada lima kabupaten dan satu kota telah rampung dilaksanakan.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan Padiatapa tahap pertama, maka dilakukan evaluasi pelaksanaan Padiatapa, yang di helat di Hotel Mercure Samarinda, Selasa (3/11/2020).

Kegiatan ini dibuka Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kaltim H Syahrir. Dia menyatakan FPIC adalah tahapan penting yang harus dilalui, namun yang terpenting kesehatan anggota tim harus dijaga.

"Ini dilakukan agar kegiatan berjalan dengan lancar. Padiatapa terlaksana, namun kesehatan tim juga harus dijaga," kata Syahrir.

Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim Prof Daddy Ruhiyat menambahkan tugas yang telah dilaksanakan Tim FPIC dilapangan tentunya bukan tugas yang ringan.

"Pastinya memiliki banyak tantangan, terutama mereka yang bertugas dilokasi dengan fasilitas yang tertinggal. Kami ucapkan syukur karena semua tim dapat kembali dengan selamat," ujarnya.

Peserta di evaluasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi diketuai Kasub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian P3SEKPI Suriyati dengan memeriksa dokumen kelengkapan selama peserta menjalankan tugasnya di lapangan.

Sebelumnya, Koordinator Project Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) I Wayan Susi Dharmawan menyampaikan pihaknya perlu mengawal aspek administrasi. Selain tertib pelaksanaan kegiatan juga harus didukung tertib administrasi.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Protokol Covid -19, dihadiri kurang lebih 50 orang dari anggota Tim FPIC. (cin/her/yans/humaspemprov Kaltim)

Foto : Adi Suseno

[#pemprov Kaltim](#)

[#humaspemprov Kaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Hotel Mercure Samarinda



5 November 2020



Presentasi Tim FPIC/Padiatapa

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bersama Pemprov Kaltim dan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) menggelar Evaluasi Pelaksanaan FPIC (Free, Prior, Informed, Consent)/Padiatapa (Persetujuan Di Awal Tanpa Paksaan) tahap I dan Persiapan Pelaksanaan FPIC/Padiatapa tahap II dalam rangka Pengambilan Persetujuan dari Desa untuk mendukung program FCPF-CF di Kaltim.

Kegiatan digelar di Hotel Mercure Samarinda, pada 3-6 November 2020. Hari ketiga, Kamis (5/11/2020) evaluasi pelaksanaan FPIC/Padiatapa memasuki tahapan presentasi hasil kunjungan lapangan ke desa-desa yang masuk dalam Program Kampung Iklim Plus (Proklam+) FCPF-CF.

Asisten Pokja Pembangunan Hijau DDPI Kaltim Reonardus mengungkapkan presentasi dilakukan seluruh Tim FPIC yang sudah turun ke desa-desa di enam kabupaten/kota, yakni Tim Paser 1-4, Tim Balikpapan-Penajam Paser Utara, Tim Kutai Barat 1-2, Tim Berau 1-4 dan Tim Kutai Timur 1-2.

"Presentasi bertujuan mengukur pencapaian pelaksanaan FPIC/Padiatapa dan refleksi tahap I, serta perbaikan pelaksanaan tahap II dan tentunya dalam rangka penguatan program FCPF di Kaltim," jelas Reonardus.

Sementara, Ketua Harian DDPI Kaltim Prof Daddy Ruhiyat menambahkan beberapa pertanyaan dari masyarakat desa-desa yang telah dikunjungi oleh Tim FPIC/Padiatapa harus dijawab secara teknis dan rinci secara tertulis, sehingga dapat dibaca dan dipahami dengan baik.

"Ini perlu dilakukan agar Tim FPIC/Padiatapa mudah menyampaikan informasi teknis kepada masyarakat desa agar mereka mudah membaca dan memahami apa yang disampaikan. Sehingga program FCPF terlaksana dan berjalan sesuai yang direncanakan," tambah Daddy.

Evaluasi pelaksanaan FPIC/Padiatapa Tahap I ini dilaksanakan sesuai protokol kesehatan pandemi Covid-19. (her/yans/humasprovkaltim).

Foto : Adi Suseno

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Hotel Mercure Samarinda



6 November 2020



Realisasi 99 Persen

Jumat (6/11/2020) memasuki hari terakhir Evaluasi FPIC (Free, Prior, Informed, Consent)/Padiatapa (Persetujuan Di Awal Tanpa Paksaan) tahap I dan Persiapan Pelaksanaan FPIC/Padiatapa tahap II dalam rangka Pengambilan Persetujuan dari Desa untuk mendukung program FCPF-CF di Kaltim.

Kegiatan digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bersama Pemprov Kaltim dan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) di Hotel Mercure Samarinda pada 3-6 November 2020.

Pada agenda hari ini, tim FPIC mengungkapkan kendala serta masukan masyarakat yang ada dilapangan.

Reonardus selaku narasumber dan salah satu konsultan FCPF berharap apa yang didiskusikan memberikan pembekalan kembali pada tim dalam rangka persiapan pelaksanaan FPIC tahap II.

"Diskusi ini bertujuan untuk mengetahui informasi lebih dalam. Dan akan di tindaklanjuti pada tahap berikutnya," jelasnya.

Sementara I Wayan Susi Darma selaku Koordinator Project FCPF mengungkapkan kerja keras Tim FPIC di lapangan melalui kunjungan ke desa-desa sudah bagus.

"Saya sangat mengapresiasi tim FPIC. Untuk realisasi dan perencanaan tahap 1 ini sangat bagus paling kecil 91 persen dan paling tinggi 99 persen," ujar Wayan.

Evaluasi FPIC/Padiatapa tahap I ini diadakan tetap memerhatikan protokol kesehatan Covid 19. (cin/her/yans/humaspemprov Kaltim)

Foto : Adi Suseno

[#pemprov Kaltim](#)
[#humaspemprov Kaltim](#)
[#lawancovid19](#)
[#infokaltim](#)
[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Hotel Mercure Samarinda



6 November 2020

Tahap II Empat Region

Persiapan Pelaksanaan FPIC/Padiatapa tahap II dalam rangka Pengambilan Persetujuan dari Desa untuk mendukung program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) di Kaltim sudah hampir selesai.

Pembiayaan pelaksanaan FPIC/Padiatapa tahap II bersumber dari Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebesar 75 persen, serta 25 persen dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI).

Untuk tahap ke II ini Tim FPIC akan di bagi menjadi empat Region yaitu Region I Balikpapan-Penajam Paser Utara, Region II Kutai Barat, Region III Kutai Timur dan Region IV Berau.

Demikian diungkapkan Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi REDD+ Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Dini.

"Dalam pelaksanaan tahap II ini setiap desa akan dikumpulkan ke satu region sesuai kabupaten/kota masing-masing tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan karena itu adalah syarat utama dari World Bank," jelasnya.

Koordinator Project FCPF I Wayan Susi Darma menambahkan mekanisme FPIC tahap II berbeda dengan sebelumnya, dimana perwakilan desa akan diundang ke regional kabupaten/kota dengan syarat membawa keputusan desa.

"Harapan saya apa yang menjadi perhatian dan pertanyaan warga desa dapat disampaikan kembali. Bagaimana peranan masyarakat desa dalam program FCPF," tambahnya. (cin/her/yans/humasprovkaltim)

Foto : Adi Suseno

[#pemprov Kaltim](#)
[#humasprovkaltim](#)
[#lawancovid19](#)
[#infokaltim](#)
[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Hotel Grand Family Barong Tongkok

-
-
-



11 November 2020



Verifikasi ANKT Kubar

Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim meleakukan verifikasi validasi data perlindungan areal nilai konservasi tinggi (ANKT) di Kabupaten Kutai Barat.

Verifikasi dilakukan menggelar Workshop Verifikasi Validasi Data Perlindungan Areal Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Hotel Grand Family Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, pada Rabu (11/11/2020).

Kepala Disbun Kaltim diwakili Kepala Bidang Perkebunan dan Pertanian Asmirilda menjelaskan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 terkait dengan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

Disampaikan bahwa perusahaan besar swasta (PBS) di Kutai Barat yang diundang 28 perusahaan. Namun, tercatat melaporkan arealnya baru sembilan perusahaan. Diharapkan PBS melaporkan kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) kepada pemerintah.

“Mari kita bersama-sama mewujudkan program pemerintah untuk penurunan emisi gas rumah kaca yang salah satunya adalah perlindungan ANKT,” ujar Asmirilda.

Diketahui Kutai Barat mempunyai target High Conservation Value (HCV) pada usaha budidaya perkebunan kurang lebih 86.658 hektare dan baru terealisasi sekitar 8.000 hektare.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kutai Barat Petrus mengajak PBS untuk proaktif bersama pemerintah melaporkan Areal NKT-nya.

“Semoga kedepan kita bisa bersama-sama tetap menjaga agar perusahaan-perusahaan ini dapat berkembang dengan baik. Masyarakat menerima manfaat, pemerintah juga dapat menerima manfaat,” harap Petrus.

Workshop kerjasama Disbun dengan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) diikuti 30 peserta dari PBS dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait Pemkab Kutai Barat. Tampak hadir pula Konsultan FCPF Yohanes Budi. (ky/her/yans/umasprovkaltim)

Foto : Arief M

- [#pemprovkaltim](#)
- [#umasprovkaltim](#)
- [#lawancovid19](#)
- [#infokaltim](#)
- [#indonesia](#)



Instagram



pemprov_kaltim

Sendawar, Kutai Barat



11 November 2020



Proklam Plus dukung IDM

KUBAR - Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Barat HM Syirajudin meminta pemangku kepentingan Kabupaten Kutai Barat untuk ikut mendukung program Kampung Iklim (Proklam) Plus.

- Dia berharap Proklam Plus dapat meningkatkan status Indeks Desa Membangun (IDM) Kaltim sesuai target RPJMD Kaltim 2019-2023 melalui peningkatan indeks ketahanan lingkungan.

Dukungan yang diperlukan dari Pemkab dan Pemerintah Desa/Kampung terhadap Proklam Plus dengan berpartisipasi aktif mensukseskan Proklam plus dalam bentuk melakukan bedah IDM khususnya pada indeks ketahanan lingkungan (IKL) dan jika skoring masih rendah perlu ditingkatkan.

Karena itu, diperlukan sinergi Proklam Plus ke dalam prioritas Dana Desa/Kampung, mensinergikan kebijakan Proklam Plus ke dalam dokumen perencanaan kabupaten dan pemerintah kampung (RPJMD Kabupaten dan RPJMDDes/kampung), menjabarkan program/kegiatan di kabupaten/kampung dalam dokumen tahunan RKPD kabupaten dan RKPDes/kampung, mengimplementasikan program/kegiatan Proklam plus dalam APBD Kabupaten dan APBDes.

"Semoga program ini dapat membudayakan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ke dalam kehidupan sehari-hari," kata Pjs Bupati Kutai Barat M Syirajudin saat membuka Sosialisasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, Rabu (11/11/2020).

Tujuan ProKlim mendorong pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat setempat untuk memahami permasalahan perubahan iklim dan dampaknya. Outputnya ProKlim desa rendah emisi.

Sementara Proklam Plus juga dapat mendukung tiga indeks kompositnya yaitu Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dan difokuskan kepada komposit Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

"Sehingga outputnya selain desa rendah emisi juga desa yang IDM nya meningkat (Proklam Plus)," katanya. (jay/yans/humasprovkaltim)

Foto : Istimewa

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Hotel Grand Family Barong Tongkok



12 November 2020

Perlindungan ANKT Mahulu

Workshop Verifikasi Validasi Data Perlindungan Areal Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kamis (12/11/2020) oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

- Kegiatan ke enam ini diadakan di Hotel Grand Family Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dibuka Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Mahulu Saripuddin SE.

Saripuddin mengapresiasi dan menyambut baik terselenggaranya workshop ini. Diharapkan para perusahaan besar swasta (PBS) dan pemerintah berkoordinasi dengan baik.

“Saya sangat berharap, partisipasi aktif teman-teman PBS bekerjasama dengan pemerintah untuk melaporkan areal NKT-nya. Semoga pertemuan kita hari ini memberi manfaat baik.” kata Saripuddin.

Berdasarkan komitmen atau perjanjian yang dilakukan beberapa waktu lalu, Kabupaten Mahulu mempunyai komitmen untuk melakukan perlindungan areal NKT seluas 107.446 Hektare.

Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan Disbun Kaltim Asmirilda menjelaskan hasil akhir pertemuan ini akan dikoordinasikan lagi oleh tim konsultan terkait benefit sharing manfaatnya untuk pemerintah, swasta maupun masyarakat setelah melakukan perlindungan terhadap ANKT ini.

Konsultan FCPF Yohanes Budi mengharapkan PBS yang belum melakukan identifikasi High Conservation Value (HCV) disarankan agar melakukan identifikasi terlebih dulu.

“Teman-teman PBS agar melakukan identifikasi HCV dulu, bisa dipilah mana hutan yang memang harus dilindungi. Supaya kita bisa selaras untuk mencapai tujuan.” imbau Budi.

Workshop kerjasama Disbun dengan FCPF ini diikuti kurang lebih 30 peserta dari PBS, OPD terkait dan perwakilan dari WWF Mahulu. Kegiatan dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. (ky/yans/humasprovkaltim)

Foto : Arief M

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Kantor Gubernur Kaltim



13 November 2020



Kunjungan Jurnalistik Modang

Biro Humas Setda Provinsi Kaltim melaksanakan kunjungan jurnalistik ke Kabupaten Paser. Kunjungan jurnalistik keenam ini dalam rangka tindak lanjut dari workshop pembelajaran jurnalistik peningkatan pemahaman kesadartahuan publik untuk melindungi hutan.

Rombongan para jurnalis dilepas secara simbolis oleh Plh Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim Andik Riyanto didampingi Kasubbag Publikasi Inni Indarpuri dan Kasubbag Eksternal Internal Hj Murni.

"Saya hanya berpesan, kunjungan jurnalistik itu berbeda dengan berita biasa. Silakan tuangkan hasil liputan anda dalam karya jurnalistik yang bagus dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya warga di sekitar hutan," pesan Andik Riyanto saat memberi arahan di Ruang Daya Taka lantai 3 Kantor Gubernur, Jumat (13/11/2020).

Andik juga mengingatkan agar karya jurnalistik dibuat secara bijak, khususnya terkait rencana besar pembangunan ibu kota negara (IKN) yang merupakan rencana pemerintah pusat.

Pasalnya kata Andik, beberapa desa yang akan dikunjungi tercatat memiliki tutupan hutan yang sangat baik dengan komitmen yang baik pula dari masyarakat untuk menjaga hutan mereka. Jika pun terdapat kekurangan, tentu harus dijelaskan sebab dan langkah yang sudah dan akan dilakukan pemerintah.

"Yang jelas, karya jurnalistik harus berorientasi pada kepentingan yang lebih luas," pesan mantan reporter dan penyiar RRI Samarinda itu.

Kepada para wartawan Andik mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan, baik keselamatan di jalan maupun bahaya Covid-19.

Apalagi, seluruh rombongan yang berangkat sebelumnya sudah menyerahkan hasil rapid nonreaktif.

"Harus jaga kesehatan dan keselamatan. Jangan sampai pulang justru membawa malapetaka. Malah kita yang diberitakan," pesan Andik.

Wartawan juga diminta untuk tidak ragu bertanya kepada para pendamping dari DDPI agar berita lebih berkualitas dan akurat.

Desa-desa yang akan dikunjungi antara lain Desa Muara Adang, Lolo dan Modang di Kecamatan Long Ikis dan Kuaro. (sul/yans/humasprovkaltim)

Foto : S Fathur

[#pemprov Kaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#Indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Muara Adang



13 November 2020



Komitmen Muara Adang

Kunjungan jurnalistik hari pertama dalam rangka tindak lanjut workshop pembelajaran jurnalistik peningkatan pemahaman kesadaran publik untuk melindungi hutan, tiba di Desa Muara Adang, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Jumat malam (13/11/2020).

Rombongan terdiri para wartawan media cetak, online, radio dan televisi lokal dan nasional itu langsung disambut Kepala Desa Muara Adang, Kurniansyah.

"Selamat datang di Desa Muara Adang," sapa Kurniansyah yang sudah menunggu bersama sejumlah staf desa.

Setelah menikmati santap malam, acara dilanjutkan sambutan selamat datang, perkenalan masing-masing media dan tanya jawab. Pertemuan digelar di Kantor Desa Muara Adang.

"Kami sangat berterimakasih karena desa kami diusulkan menjadi bagian dari program FCPF Carbon Fund ini," kata Kurniansyah.

Ia menjelaskan komitmen masyarakat Muara Adang untuk menjaga hutan mangrove dan hutan alam di sekitar mereka sudah berlangsung sejak para leluhur dulu.

"Ada atau tidak program FCPF, kami akan tetap menjaga hutan. Karena itulah sumber penghidupan kami," jelas Kurniansyah.

Sudah sejak lama desa berpenduduk 1.783 jiwa dengan 642 kepala keluarga itu tidak membolehkan penggunaan pukat harimau di sekitar teluk desa mereka untuk menangkap ikan dan udang.

Nelayan setempat tidak mencari ikan ke laut lepas, tapi di sekitar Teluk Adang saja. Sebab itulah, mereka tidak ingin teluk dan mangrovenya rusak karena penggunaan alat yang merusak ekosistem lingkungan.

"Besok (pagi ini) kita akan lihat barisan mangrove di bibir pantai yang masih terus kami jaga. Luas cagar alam hutan kami seluruhnya sekitar 3.000 hektar," ucapnya ramah.

Kunjungan jurnalistik juga didampingi Biro Humas Setda Provinsi Kaltim dan DDPI Kaltim. Acara ditutup dengan sajian seni tradisional gambus yang masih dipertahankan warga desa setempat. (sul/yans/humasprovkaltim).

Foto : S Fathur

[#pemprov Kaltim](#)

[#humasprov Kaltim](#)

[#Indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Desa Muara Adang



14 November 2020

Silvofisheri VS Enclave

Pemerintah Desa Muara Adang terus berupaya meyakinkan masyarakat setempat untuk mendukung pengembangan tambak ramah lingkungan (silvofisheri). Tambak dimana ditengahnya bisa ditanami tumbuhan laut seperti mangrove dan rambai laut.

Namun mereka masih harus berhadapan dengan pandangan masyarakat yang menolak rencana tersebut, karena menilai rencana itu hanya tahapan untuk mengambil alih lahan-lahan yang mereka kelola dan merupakan areal cagar alam Muara Adang.

"Kesulitan kami karena sebagian masyarakat berpandangan belum sama dengan pemerintah. Mereka beranggapan jika areal mereka ditanami mangrove, mereka takut lahan diambil negara karena merupakan areal cagar alam. Padahal tidak seperti itu," kata Kepala Desa Muara Adang Kurniansyah, Kecamatan Long Ikis, Paser, Sabtu (14/11/2020).

Umumnya masyarakat membuka tambak seluas-luasnya, tanpa meninggalkan satu pun tumbuhan. Cara ini sangat berbeda dengan silvofisheri yang tetap menempatkan mangrove di tengah dan sekitar tambak.

Pemerintah desa kata Kurniansyah, di satu sisi harus membela masyarakat, namun di sisi lain harus patuh dengan aturan pemerintah.

"Kita perlu waktu untuk berhasil nampaknya," imbuah Kurniansyah.

Dijelaskan, sebenarnya status cagar alam di sini tidak sepenuhnya terkunci. Masyarakat masih bisa memanfaatkan lahan untuk kehidupan ekonomi sehari-hari.

Alasannya, desa ini sudah ada sejak ratusan tahun dulu, sedangkan status cagar alam baru tahun 1984. Karena itu masyarakat ingin lepas dari cagar alam.

Kurniansyah menyebut, pihaknya akan berjuang untuk mengusulkan tuntutan masyarakat agar ada enclave kawasan bersama beberapa desa lainnya agar masyarakat lebih mudah dan mendukung silvofisheri.

Saat ini Desa Muara Adang memiliki tambak ramah lingkungan seluas 25 hektar (demplot) ditambah 70 hektar yang dikerjakan tahun ini, serta tambahan 90 hektar untuk tahun depan. (sul/yans/humasprovkaltim)

Foto : S Fathur

[#pemprovkalitim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokalitim](#)

[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Hotel Royal Victoria Sangatta



17 November 2020



55 Ribu Hektar

Dinas Perkebunan Kaltim menggelar Workshop Verifikasi Validasi Data Perlindungan Areal Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) Kabupaten Kutai Timur, Selasa 17 November 2020.

Program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Kaltim ini digelar di Ballroom Pelangi 1 Hotel Royal Victoria Sangatta dibuka Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad secara virtual dari Kabupaten Berau.

Kegiatan satu hari penuh diikuti 70 peserta terdiri OPD terkait lingkup Pemkab Kutim, Forum Perkebunan Berkelanjutan Kutim, Pengumpul Data/Alumni ANKT, Gapki, DDPI, YKAN, Kalfor, GIZ, Earthworm serta perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit.

Workshop menerapkan protokol kesehatan Covid-19, diisi komitmen kabupaten dalam perlindungan ANKT dalam usaha perkebunan guna mendukung Program FCPC-Carbon Fund. Serta, verifikasi validasi data spasial ANKT di perusahaan perkebunan oleh Tim GIS dan konsultan FCPF-CF.

Menurut Ujang Rachmad, Pemerintah Provinsi Kaltim sangat berkomitmen terhadap pembangunan lingkungan dan kegiatan usaha yang berkelanjutan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2018

"Karenanya, kegiatan usaha perkebunan diarahkan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai Perda Kaltim nomor 7 tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan," katanya.

Selain itu, perlindungan kawasan dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) bukanlah hal baru bagi Kaltim. Dimana, sejak delapan tahun lalu telah diupayakan perlindungan ANKT untuk areal perkebunan kelapa sawit.

"Perlindungan ANKT menjadi program prioritas dalam kegiatan perkebunan. Maka, hari ini lah kita membuktikan kepada nasional dan dunia komitmen awal delapan tahun ini. Upaya penurunan GRK di sektor perkebunan," ungkap Ujang.

Disebutkan, sesuai komitmen di Kutim terdapat 90 PBS yang melapor dari 133 PBS. Total luas areal 417.505 hektar dan berkomitmen 75.299,54 hektar dilindungi, namun realisasi mencapai 55.468,37 hektar. (yans/sdn/humasprovkaltim)

Foto : S Syaiful Al Qadrie

[#pemprov Kaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Hotel Blue Sky Balikpapan

-
-
-



17 November 2020

Persetujuan Desa

BALIKPAPAN - Dinas Lingkungan Hidup Kaltim menggelar Sosialisasi dan Konsultasi tingkat desa tahap II untuk mengambil persetujuan dari para pihak di tingkat desa dalam mendukung pelaksanaan program penurunan emisi dalam skema Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) di Kaltim.

Sosialisasi dan konsultasi Program FCPF-CF Tingkat Kabupaten/Kota (Regional Balikpapan - Penajam Paser Utara (PPU), Dan Paser) Provinsi Kaltim yang dipusatkan di Hotel Blue Sky Balikpapan, Selasa (17/11/2020).

Perwakilan Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim KLHK Dinik Indrihastuti menjelaskan kegiatan tahap kedua ini bagian penting karena bertujuan untuk pengambilan berita acara pelaksanaan kegiatan penurunan emisi dalam skema FCPF dengan perwakilan masyarakat desa/adat di Kaltim.

"Program Penurunan Emisi ini merupakan bagian upaya yang signifikan dari Pemda dan Pusat dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dan memastikan langkah pembangunan hijau di Kaltim dan Indonesia," kata Dinik Indrihastuti

Kegiatan dibuka Walikota Balikpapan H M Rizal Effendi, dihadiri Ketua Tim FPIC Tahap II Region Balikpapan, PPU dan Paser Purwanto Sekda Kab. PPU Ahmad serta OPD terkait dan diikuti 22 Kepala Desa/Kelurahan dari Region Balikpapan, PPU, Paser dan para pendamping desa.

Rizal Effendi menjelaskan kegiatan pengurangan emisi mungkin sudah kerap dilakukan masyarakat, namun belum diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan.

"Kegiatan sudah dilaksanakan sebagai program pembangunan, namun belum dimaknakan atau ditunjukkan sebagai upaya yang direncanakan untuk tujuan pengurangan emisi," ujar Rizal Effendi.

Menurut dia, program ini harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dan perlu difasilitasi hukum adatnya, sehingga dituangkan dalam tata ruang desa dan masuk dalam program jangka menengah desa karena akan diukur, semakin bagus kinerjanya semakin besar insentifnya.

Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan berita acara dukungan pelaksanaan program penurunan emisi FCPF-CF Provinsi Kaltim. (seno/yans/humasprovkaltim)

Foto : Adi Suseno

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#indonesia](#)



Instagram



pemprov_kaltim

Hotel Exclusive Tanjung Redep



19 November 2020



Perkebunan Dukung FCPF

Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kaltim kembali menggelar Workshop Verifikasi Validasi Data Perlindungan Areal Nilai Konservasi Tinggi (ANKT). Kali ini di gelar di kabupaten paling utara Benua Etam, yakni Bumi Batiwakkal, Kabupaten Berau. Sekaligus menjadi rangkaian terakhir dari pelaksanaan workshop di tujuh kabupaten se Kaltim.

Kegiatan workshop dalam kerangka program Forest Carbon Partnership Facility- Carbon Fund (FCPF-CF) ini digelar di Ballroom Hotel Exclusive, Tanjung Redeb, Kamis (19/11/2020), dibuka Kepala Disbun Kaltim Ujang Rachmad.

Ujang Rachmad mengungkapkan workshop ini sebagai upaya melakukan verifikasi dan identifikasi luasan ANKT yang sejak awal ditetapkan dalam deklarasi pembangunan perkebunan berkelanjutan, yaitu seluas 640 ribu hektare di 7 kabupaten se Kaltim.

"Data-data awal itu akan kita verifikasi kembali, sekaligus memastikan sesungguhnya berapa yang bisa kita kelola ANKT nya," ungkap Ujang.

Disebutkan Ujang, angkanya mungkin memang lebih kecil dari 640 ribu hektare, tetapi pada saatnya nanti setelah verifikasi dan validasi luasan, lokasinya dimana dan jenis ANKT nya.

Nantinya ungkapnya, menentukan bentuk-bentuk dan cara-cara pengelolaan ANKT di masing-masing perkebunan, baik pada areal sudah berijin ataupun belum berijin yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Untuk wilayah Berau, lanjut dia, sesuai komitmen awal yang dituangkan dalam bentuk SK Bupati untuk kawasan perkebunan yang belum dibebani ijin sudah ditetapkan seluas 80 ribu hektare.

"Nanti kita akan lihat di Berau ini berapa diperoleh ANKT nya setelah di verifikasi dan validasi. Namun seperti diketahui data awal pada areal yang telah dibebani ijin sudah ada teridentifikasi seluas 14 ribu hektare lebih," jelasnya.

Hadir Kepala Disbun Berau Sumaryono serta jajaran, Sekretaris Disbun Kaltim Henny Herdiyanto, Koordinator Proyek FCPF I Wayan Susi Dharmawan, Forum Perkebunan Berkelanjutan Berau, DDPI Kaltim, YKAN, GIZ, Solidaridad, Gapki, serta perwakilan perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) di wilayah Berau. (her/yans/humasprovkaltim)

Foto : Heru Rinaldy

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Hotel Grand Family Barong Tongkok



19 November 2020



Sejalan Pembangunan Hijau

BARONG TONGKOK - Pelaksanaan pengambilan pernyataan kegiatan FPIC atau persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa) dalam program penurunan emisi GRK melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan berbasis yuridiksi (FCPF-CF) di Ballroom Hotel Grand Family, Barong Tongkok, Kutai Barat, Kamis (19/11/2020).

Kegiatan diikuti 18 desa di Kutai Barat merupakan Padiatapa tahap kedua untuk mengambil persetujuan pihak desa dalam mendukung pelaksanaan program penurunan emisi dalam skema FCPF-CF.

Untuk diketahui, pelaksanaan Padiatapa program penurunan emisi FCPF Carbon Fund di Kaltim tahap pertama, telah selesai dilaksanakan di 99 desa terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota.

Mewakili Bupati Kutai Barat, Plt Asisten II Novandel menyambut baik kegiatan FCPF-CF sekaligus membuka acara sosialisasi. Menurutnya, kegiatan ini memberikan dampak positif bagi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM).

"Kami siap melaksanakan dan mengimplementasikan program ini. Karena sejalan dengan konsep pembangunan hijau Kaltim," tutur Novandel.

Dia yakin, sosialisasi Padiatapa memiliki tujuan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup serta perubahan iklim.

"Kami semua punya hutan. Tanpa disuruh, sudah kami jaga, tanpa diupah sudah kami pelihara," tutur Kepala Adat Desa Lakan Bilem Hermanika.

Hermanika menyampaikan kebiasaan dan adat masyarakat dalam memelihara hutan. Program FCPF-CF ini tentu sudah sejalan dengan apa yang telah dilakukan dengan masyarakat selama ini.

Hadir Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim KLHK Dinik Indrihastuti dan Ketua Pokja MRV DDPI Kaltim Fadjar Pambudhi. (yuv/yans/humasprovkaltim)

Foto : Yuvita Indrasari

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Hotel Exclusive Tanjung Redep



26 November 2020



FCPF Manfaatnya Besar

Tim Region Berau melaksanakan FPIC (Free, Prior, Informed, Consent)/Padiatapa (Persetujuan Diawal Tanpa Paksaan) tahap II dalam rangka pengambilan persetujuan dari Desa untuk mendukung Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan Berbasis Yurisdiksi atau dikenal dengan program Forest Carbon Partnership Facility - Carbon Fund (FCPF-CF). pada desa atau kampung di Kaltim

Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Exclusive, Tanjung Redeb, Berau, pada Kamis, (26/11) ini dibuka oleh Pjs Bupati Berau diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Ilyas Nasir.

Disampaikan kegiatan ini penting dan berharap dapat dimasukkan ke dalam revisi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) khususnya penyusunan dalam kegiatan FCPF.

"Saya berasal dari kampung dan tidak dapat dipisahkan dari kampung dan berharap kampung bisa maju karena kalau bisa menurunkan emisi akan mendapatkan dana dan pastinya manfaat yang besar juga untuk kampung " jelasnya.

Sementara, Kordinator PMU FCPF Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)I Wayan Susi Dharmawan menyatakan gembira melihat antusiasme para kepala kampung yang hadir dari berbagai penjurur Kabupaten Berau.

"Saya sangat optimis Kaltim 2020 - 2024 akan berhasil dengan dukungan bapak ibu semua dan Kaltim sebagai pionir implementasi serta menjadi model provinsi-provinsi di indonesia untuk penurunan emisi karbon," tegasnya.

Pada kesempatan ini dilakukan penyerahan berita acara persetujuan kampung dalam mendukung program FCPF secara simbolis dari desa. Kegiatan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan Covid 19 dan di hadiri 38 kepala kampung di Kabupaten Berau. (cin/her/yans/humasprovkaltim)

Foto : S Fathur Alqadrie

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)



Instagram



pemprov_kaltim

Desa Jonggon Jaya

-
-
-



8 Desember 2020

Tanam Sengon untuk Rakyat

JONGGON JAYA - Pagi ini, Selasa (8/12/2020), di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu Kutai Kartanegara, Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi didampingi Kepala Dinas Kehutanan Kaltim H Amrullah melakukan penanaman Pohon Sengon dalam rangka pembangunan hutan rakyat.

Penanaman digelar oleh Dinas Kehutanan Kaltim dengan total bibit di Jonggon Jaya 102.000 bibit yang diperuntukkan bagi dua Kelompok Tani.

"Bibit diperuntukkan bagi Purnama Jaya 50 ha, Harapan Jaya 100 ha. Dengan jarak tanam 4x4 meter. Inshaallah Wagub Hadi Mulyadi yang meresmikan penanamannya," Kadishut Kaltim H Amrullah difampingi Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan RHL, Seksi RHL H Joko Susanto.

Menurut Amrullah penanaman ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung kelestarian alam di Kaltim, termasuk mengurangi zat emisi karbon, sekaligus menyukseskan program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF).(jay/yans/humasprovkaltim)

Foto : M Noorjaya

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)



Instagram



pemprov_kaltim

Desa Jonggon Jaya

-
-
-



8 Desember 2020



Sukseskan Hutan Rakyat

JONGGON JAYA- Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi resmi mencanangkan penanaman bibit Sengon di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu Kutai Kartanegara, Selasa (8/12/2020).

Hadi bersyukur kegiatan penanaman, seluruh masyarakat Jonggon Jaya siap menyukseskan program pembangunan hutan rakyat di Kaltim yang digagas Dinas Kehutanan Kaltim.

"Kami bersyukur masyarakat Jonggon Jaya siap membangun program Hutan Rakyat dengan cara penanaman bibit Sengon," kata Hadi Mulyadi.

Hadi berharap program ini memberikan manfaat bagi masyarakat, tak terkecuali warga Jonggon Jaya. Selain wujud pelestarian lingkungan juga mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

Karena, telah memanfaatkan hutan untuk kepentingan masyarakat. Kedepannya, bukan hanya tanaman keras, tapi bisa program tumpang sari dengan menanam jahe, sukun dan porang.

"Dengan begitu kita dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat Kaltim khususnya Kutai Kartanegara," jelasnya.

Kepala Dishut Kaltim Amrullah menyebutkan Sengon di Jonggon Jaya total 102.000 bibit yang diperuntukkan dua Kelompok Tani.

"Bibit diperuntukkan Kelompok Tani Purnama Jaya dengan lahan 50 ha, Harapan Jaya 100 ha. Dengan jarak tanam 4x4 meter," jelasnya.

Pencanangan ditandai penanaman oleh Wagub Hadi Mulyadi dan penyerahan simbolis bantuan pembangunan hutan rakyat bagi dua kelompok tani Jonggon Jaya.

Hadir Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kukar Wicaksono Subagio dan Kades Jonggon Jaya Cholil. (jay/yans/humasprovkaltim)

Foto : A. Riyandi

[#pemprovkaltim](#)
[#humasprovkaltim](#)
[#lawancovid19](#)
[#infokaltim](#)
[#indonesia](#)



Instagram



pemprov_kaltim

Hotel Mercure Samarinda



11 Desember 2020



Susun Laporan Padiatapa

Mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLH Kaltim Syahrir mengungkapkan kegiatan Persetujuan Di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa)/Free, Prior, Informed, Consent (FPIC) tahap I dan II dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) telah dilaksanakan sejak Oktober dan November 2020.

"Semua sudah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat desa dan dilanjutkan dengan penandatanganan kesediaan desa untuk ikut dalam program FCPF-CF. Tahapan saat ini informasi apa saja yang didapatkan harus dilaporkan secara rinci tanpa ada yang ditutupi, agar menjadi catatan penting bagi kita semua pada pelaksanaan tahapan selanjutnya," kata Syahrir saat membuka kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Padiatapa (Persetujuan Di Awal Tanpa Paksaan) Tahap II melalui Pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan Berbasis Yurisdiksi (FCPF-CF) Provinsi Kaltim 2020, di Hotel Mercure Samarinda, Jumat (11/12).

Sebelumnya, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Emma Rachmawaty mengatakan pelaksanaan FCPF-CF walaupun diawali dengan keraguan tetapi akhirnya mampu dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dimana tahapan Padiatapa mulai dari pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan dan pasca pelaksanaan dilakukan dengan baik. 99 desa di lima kabupaten dan dua kota telah dikunjungi Tim FPIC untuk menyosialisasikan FCPF-CF, yakni Region I (Balikpapan, PPU dan Paser), Region II (Kutai Barat dan Mahulu), Region III (Kutai Timur) dan Region IV (Berau).

"Kompensasi dana sebesar USD 110 juta apabila emisi karbon berkurang 22 juta ton CO₂eq selama lima tahun (2020–2024) di Kaltim. Aksinya ada di lapangan dan tetap terjaga. Artinya tahun depan jika kita sudah siap maka kita bisa menerima kompensasi pembayaran dari negara donor melalui Bank Dunia," kata Emmy.

Hadir, Ketua Pokja MRV DDPI Kaltim Fadjar Pambudhi, Tim FPIC Region I-IV dan perangkat daerah terkait lingkup Pemprov Kaltim. (her/yans/humasprovkaltim)

Foto : Adi Suseno

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)



Instagram



pemprov_kaltim

Kantor Gubernur Samarinda



11 Desember 2020



Kunjur Kubar

Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim HM Syafranuddin resmi melepas Kunjungan Jurnalistik (Kunjur) Field Visit ke Kutai Barat (Kubar) 11 - 14 Desember 2020 di Ruang Daya Taka Kantor Gubernur, Jumat (11/12/2020).

Kunjungan jurnalistik ini merupakan tindak lanjut dari Workshop Pembelajaran Jurnalistik Peningkatan Pemahaman Kesadartahuan Publik kerja sama Biro Humas Setda Provinsi Kaltim dan Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF).

"Hampir 23 tahun saya tidak ke Kubar. Baru kemarin ke sana. Ternyata Kubar sudah jauh berubah. Makin maju," kata Syafranuddin.

Satu hal yang dia kagumi dari Kubar adalah kesetiaan masyarakat Tanaa Purai Ngeriman untuk tetap menjaga hutan mereka.

"Itu yang saya kagumi dari Kubar. Meskipun investasi masuk ke sana, hutan hijau mereka masih terjaga. Makanya kampung iklim program FCPF banyak di sana. Silakan dieksplorasi. Mereka juga melestarikan seni budaya," sambung Ivan, sapaan karibnya.

Sejumlah wartawan yang mengikuti kunjungan jurnalistik ini berasal dari media cetak, online, radio dan juga televisi.

Mendampingi mereka tampak Kepala Bagian Kehumasan Andik Riyanto.

"Mudah-mudahan berangkat sampai pulang semua tetap sehat. Tetap protokol kesehatan ya," doa Ivan. (sul/yans/humasprovkaltim)

Foto : S Fathur

[#pemprovkaltim](#)
[#humasprovkaltim](#)
[#lawancovid19](#)
[#infokaltim](#)
[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Kampung Linggang Melapeh



12 Desember 2020



Terkesan Linggang Melapeh

Kepala Bagian Kehumasan Setda Provinsi Kaltim Andik Riyanto mengaku kagum dengan penyambutan warga Kampung Linggang Melapeh terhadap rombongan wartawan dalam kunjungan jurnalistik di Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

- Keramahtamahan warga Linggang Melapeh ini menurut Andik, pantas untuk terus dipromosikan oleh wartawan dan media massa, selain komitmen kuat mereka untuk hidup nyaman berdampingan dengan hutan (sejahtera dan mandiri) tanpa merusak hutan.

"Yang sangat kami terkesan dari Kampung Linggang Melapeh ini, semua masyarakatnya welcome. Kami disambut dengan sangat baik," kata Andik Riyanto saat pertemuan di Lamin Luuq Melapeh, Sabtu (12/12/2020).

Para wartawan dan Tim Liputan Biro Humas diterima oleh Petinggi Kampung Linggang Melapeh, Musiman, ada pula perwakilan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), tokoh adat, tokoh pemuda bahkan perwakilan kelompok tani setempat.

Seluruh rombongan yang berjumlah 12 orang juga menerima gelang tangan berbahan rotan yang dianyam oleh para muda-mudi setempat. Wartawan juga menerima masker khusus dengan tampilan ukiran motif Dayak yang sangat menarik.

Petinggi Kampung Linggang Melapeh, Musiman menegaskan, pihaknya memang sangat terbuka dengan para tamu yang datang.

Apalagi, kunjungan kali ini diprakarsai Biro Humas Setda Provinsi Kaltim dalam program peningkatan kesadaran publik untuk menjaga hutan, kerja bareng FCPF-Carbon Fund.

"Dalam keadaan apapun kami siap menerima tamu yang datang ke Linggang Melapeh. Apalagi dari Biro Humas Provinsi Kalimantan Timur. Suatu kehormatan bagi kami," puji Musiman yang setia mendampingi kunjungan para wartawan ke sejumlah lokasi di sekitar hutan Linggang Melapeh.

Selain memiliki 17 jantur (air terjun), Kampung Linggang Melapeh menyimpan wisata alam sangat menarik berupa Danau Acco di atas bukit yang berada di ketinggian 415 meter di atas permukaan laut dikelilingi pohon-pohon hutan yang rimbun dan asri.

"Infrastruktur jalan di sini juga sangat mendukung. Mulus sampai lokasi, tempat wisata," kata Dzulfikar, salah seorang wartawan media online. (sul/yans/humasprovkaltim)

Foto : S Fathur

[#pemprovkaltim](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Kampung Linggang Melapeh



12 Desember 2020



Komitmen Linggang Melapeh

Hari kedua kunjungan jurnalistik kerja sama FCPF-CF dengan Biro Humas Setda Provinsi Kaltim mengarah ke Kampung Linggang Melapeh di Kutai Barat (Kubar).

Kampung yang berada di Kecamatan Linggang Bigung itu dikenal memiliki komitmen kuat untuk menjaga hutan di sekitar mereka.

"Komitmen kami adalah kreatif dan produktif, sehingga berdampak terhadap pendapatan ekonomi masyarakat secara langsung, namun hutan tetap lestari," kata Petinggi Kampung Linggang Melapeh, Musiman di Lamin Luuq Melapeh, Sabtu (12/12/2020).

Kampung berpenduduk 1.935 jiwa itu secara teratur memanfaatkan potensi hutan mereka, tanpa merusaknya. Mereka memanfaatkan hasil hutan untuk membuat produk-produk kerajinan bernilai tambah, seperti gelang, masker, dan hasil kerajinan lainnya.

Komitmen yang terus dibangun agar masyarakat bisa terus hidup mandiri dan sejahtera berdampingan dengan alam, tanpa merusak hutan.

Musiman juga menjelaskan bagaimana hingga saat ini mereka masih memiliki komitmen kuat untuk menjaga Gunung Eno yang sudah dilegalkan dengan SK Bupati Kubar menjadi kawasan lindung.

Kawasan yang dilindungi seluas 90 hektar. Ditambah hibah masyarakat 10 hektar. Mereka sudah bersepakat untuk tidak mengganggu kawasan hutan itu, karena mereka yakin hutan adalah sumber kehidupan. Sejak tahun 1982 hutan itu konsisten mereka jaga.

"Kami jaga hutan agar air tetap terjaga. Air bersih tetap dapat dikonsumsi oleh masyarakat," jelas Musiman.

Cukup beralasan karena Kaawasan Lindung Gunung Eno melindungi lima mata air yang mengalir ke sejumlah sungai antara lain Sungai Maap, Sungai Lemiang, Sungai Sulau dan Sungai Atay Selah.

Rombongan wartawan yang dipimpin Kabag Kehumasan Biro Humas Setda Provinsi Kaltim Andik Riyanto juga diajak untuk melihat demplot tanaman kopi dan lada yang dikelola Kelompok Tani Kola Lestari melalui pendampingan WWF.

Kunjungan jurnalistik juga mengarah ke Jantur (air terjun) Tabalas, Danau Acco dan Kawasan Konservasi Cagar Alam Padang Luway utk melihat keindahan berbagai ragam jenis anggrek yang dilindungi.

Desa tersebut scr keseluruhan memiliki 17 jantur yg menjadi kekayaan wisata mereka. (sul/yans/humasprovkaltim)

Instagram



pemprov_kaltim

Kampung Lakan Bilem



13 Desember 2020



Menjaga Hutan Lakan Bilem

Hari ketiga kunjungan jurnalistik di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) berlanjut ke Kampung Lakan Bilem.

- Lakan Bilem merupakan kampung yang sudah menyepakati pelaksanaan program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF). Sedangkan Kampung Intu Lingau menjadi salah satu dari 150 usulan program kampung iklim (Proklam)+ di Kaltim.

Komitmen tertulis untuk menjaga hutan desa seluas 200 hektar oleh warga Lakan Bilem sudah dimulai sejak tahun 2012 dalam sebuah peraturan desa tentang perlindungan hutan.

Aturan ini harus dibuat karena mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat berasal dari hutan, seperti rotan, damar dan kayu.

"Periode pertama kepemimpinan, saya sudah mengajak masyarakat untuk menjaga hutan. Meskipun kita berladang, hutan tetap harus kita jaga," kata Petinggi Kampung Lakan Bilem Yosianus Moja di Bumi Perkemahan Batuq Bura Kampung Lakan Bilem, Minggu (13/12/2020).

Diakuinya, di awal memang sulit, karena tidak semua masyarakat bisa menerima rencana tersebut. Mereka pun mulai berinisiatif mengembangkan eko wisata Sungai Lakan di areal Bumi Perkemahan Batuq Bura.

Saat ini lanjut Yosianus, masyarakat Kampung Lakan Bilem sudah memberi dukungan, karena memahami dan menikmati manfaat dari aktivitas menjaga hutan, salah satunya dari wisata Sungai Lakan yang kini menjadi destinasi baru warga Kubar selain Gunung S dan wisata jantur (air terjun) dan Danau Acco.

Soal insentif dari FCPF-CF, Yosianus menegaskan, komitmen masyarakat Lakan Bilem tidak akan berubah.

"Ada atau tidak insentif dana FCPF Carbon Fund, kami akan tetap menjaga hutan," tegasnya. (sul/yans/humasprovkaltim)

Foto : S Fathur

[#pemprovkaltim](#)

[#humasprovkaltim](#)

[#lawancovid19](#)

[#infokaltim](#)

[#indonesia](#)

Instagram



pemprov_kaltim

Hotel Mercure Samarinda

-
-
-



14 Desember 2020



Laporan Tahap II Selesai

SAMARINDA - Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kaltim Syahrir mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim menutup secara resmi kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan padiatapa tahap II melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan berbasis yuridiksi (FCPF - CF) Provinsi Kaltim Tahun 2020, di Hotel Mercure, Senin (14/12/2020).

Syahrir mengaku bangga atas capaian tim FPIC, karena berhasil melaksanakan tugas dan misi memberikan informasi ke masyarakat desa tentang FCPF - Carbon Fund, sehingga dari 99 desa yang disosialisasikan, tidak ada satupun yang menolak, bahkan semua setuju mengikuti program FCPF - Carbon Fund.

"Alhamdulillah di tahap II pada saat pengambilan keputusan, semua desa menyetujui untuk ikut dalam program FCPF - Carbon Fund. Ini merupakan indikator keberhasilan untuk tim FPIC karena misinya berhasil," kata Syahrir

Perwakilan Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim KLHK Dinik Indrihastuti memberikan apresiasi kepada DLH Kaltim, DDPI Kaltim, dan tim pelaksana FPIC di 4 Region, yakni Region I (Balikpapan, PPU dan Paser), Region II (Kutai Barat dan Mahulu), Region III (Kutai Timur) dan Region IV (Berau) yang sudah melaksanakan kegiatan mulai Oktober hingga Desember sampai finalisasi penyelesaian laporan.

"Semoga apa yang dilaksanakan dari awal hingga akhir dapat bermanfaat untuk kemajuan Kaltim, dan besar harapan saya kegiatan ini berjalan lancar sesuai harapan kita semua, sehingga Kaltim memperoleh RPP sesuai target penurunan emisi yang sudah ditetapkan pada dokumen ERPA," ujar Dinik Indrihastuti

Hadir pula Ketua DDPI Kaltim Prof. Daddy Ruhiyat, Tim FPIC Region I - IV, dan perangkat daerah terkait lingkup Pemprov Kaltim.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan dan pemberian sertifikat serta cinderamata dari DLH Kaltim kepada Ketua Tim FPIC masing-masing Region. (seno/yans/humasprovkaltim)

Foto : Adi Suseno

[#pemprovkaltim](#)
[#humasprovkaltim](#)
[#lawancovid19](#)
[#infokaltim](#)
[#indonesia](#)



Instagram



pemprov_kaltim

Kantor Gubernur Samarinda



15 Desember 2020



Capaian Luar Biasa

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menjadi pembicara pada Webinar, Launching dan Talk Show Menuju Implementasi Pembayaran Penurunan Emisi Program FCPF-CF - Indonesia - World Bank, secara daring di ruang Heart of Borneo (HoB) Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (15/12/2020).

-
-
-

Kegiatan dibuka Kepala Balitbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Agus Justianto ini, para pembicara dan peserta webinar menyaksikan Penandatanganan Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) oleh Sekjen Kementerian LHK, Bambang Hendroyono dan Director Country World Bank for Indonesia and Timor Leste, Satu Kahkonen.

Gubernur Isran Noor menyampaikan kerja keras Kaltim didukung Kementerian LHK dan lembaga mitra dalam menurunkan emisi karbon di Kaltim program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) membuahkan hasil, hingga fase menuju implementasi pembayaran penurunan emisi.

Isran mengakui upaya ini sebuah capaian yang luar biasa atas penandatanganan ERPA. Ini adalah hasil yang sangat luar biasa dan nilai jarang ditemukan, yakni sebesar US\$ 110 juta atau sekitar 1,5 triliun rupiah dari FCPF, sebagai kompensasi untuk mengurangi 22 juta ton CO₂e di Kaltim selama lima tahun ke depan.

"Mudahnya ada kemajuan, ini bisa ditingkatkan atau lebih dari 22 juta ton emisi CO₂e," kata Isran Noor.

Mantan Bupati Kutai Timur ini menjelaskan perkiraan program ini bisa mengurangi emisi bersih selama lima tahun sebesar 61,3 juta ton CO₂e. Sedangkan kontrak ER Volume saat ini mencapai 22 juta ton CO₂e dan bisa meningkat karena ada pembayaran tambahan sampai 42 juta ton CO₂e.

"Sebagian besar kegiatan untuk kepentingan kelompok masyarakat dan pemerintah desa seperti pelatihan pencegahan kebakaran, penyediaan peralatan, dan membantu masyarakat dan petani untuk mematuhi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan standar kelapa sawit berkelanjutan," jelasnya.

Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono mengungkapkan program penurunan emisi karbon berlangsung sangat panjang dan telah melalui proses sejak tahun 2011 dengan dipilihnya Kaltim sebagai provinsi pilot project. Hingga pada 2020 mencapai fase implementasi 2020-2024. (her/yans/humasorovkaltim)

Foto : Syaiful Alqadrie

Instagram



pemprov_kaltim

Kantor Gubernur Samarinda



15 Desember 2020



Usul 15 Persen

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menyampaikan secara khusus usulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) agar dalam pengelolaan dana kompensasi dari Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) sebesar 25 persen, nantinya porsi untuk Pemprov Kaltim 15 persen dan Kementerian LHK 10 persen.

"Bahwa untuk mencapai sebuah keberhasilan apalagi ini sebagai sebuah pilot project, dari dana teralokasi 25 persen keperluan manajemen operasional itu, mudah-mudahan 15 persennya yang bisa dikelola oleh Provinsi Kaltim, jadi yang dikelola Kementerian LHK itu cukup 10 persen saja," ucap Isran Noor dalam paparannya pada Webinar, Launching dan Talk Show Menuju Implementasi Pembayaran Penurunan Emisi Program FCPF-CF - Indonesia - World Bank, secara daring di ruang Heart of Borneo (HoB) Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (15/12/2020).

Isran Noor mengungkapkan Pemprov Kaltim kedepan akan membentuk Project Management Unit (PMU) yang secara operasional melaksanakan pekerjaan terkait penurunan emisi karbon di lapangan.

Baginya, tidak mungkin pemerintah yang selama ini banyak pekerjaan terkait dengan tugas-tugas pokoknya yang lain, maka Pemprov sudah menyiapkan sebuah payung hukum, sebuah unit kerja yang akan dilaksanakan dari berbagai macam sumber daya manusia (SDM).

"Apakah dari pemerintahan, para ahli, perguruan tinggi, masyarakat swasta di Kaltim. Dan ini akan memudahkan dalam hal kegiatan evaluasi, monitoring dan pelaksanaan-pelaksanaan pada tingkat lapangan," ungkap Isran.

Isran Noor berharap usulan diakomodir dan ditindaklanjuti pemerintah pusat (Kementerian LHK), sehingga pemerintah daerah lebih maksimal mewujudkan program penurunan emisi karbon di wilayahnya.

Bahwa apa yang sudah dilakukan masyarakat Kaltim dalam hal program penurunan emisi, lanjutnya, memang betul-betul dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

"Dan itu ditingkat lapangan dilakukan oleh masyarakat didukung pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota," pungkasnya. (her/yans/humasprovkaltim)

Foto : Syaiful Alqadrie

Instagram



pemprov_kaltim

Kantor Gubernur Samarinda



"Virtual Ceremony" + "Launching dan Talkshow"

Menuju Implementasi Pembayaran Penurunan Emisi Program FCPF-CF - Indonesia - World Bank

PEMBICARA UTAMA

SELASA, 15 Des 2020
WAKTU: 08.30 WIB – 12.00 WIB

zoom (BY INVITATION) DENGAN UNDANGAN
YouTube <https://youtu.be/FGUYMMefiml>

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si
Gubernur Kalimantan Timur

Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Satu Kähkönen
Direktur Country Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste

DIKUTI OLEH KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMPROV KALIMANTAN TIMUR



15 Desember 2020



Instagram



pemprov_kaltim

Kantor Gubernur Samarinda



SELASA, 15 Des 2020
WAKTU: 08.30 WIB – 12.00 WIB

zoom (BY INVITATION) DENGAN UNDANGAN
YouTube <https://youtu.be/FGUYMMefiml>

"Talkshow"

PEMBICARA

Ir. H. Stepi Hakim, MEMD
MODERATOR

Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, MM.
Kepala Bappeda Provinsi Kaltim

Ir.H. Nazrin, M.Si
Kepala Biro Perencanaan Setda Provinsi Kaltim

Prof. Daddy Ruhiyat
Ketua Harian DDPI Kaltim

Dr. Djoko Hendratto
Direktur Utama BPDH

Ir. Emma Rachmawati, M.Sc
Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK

DIKUTI OLEH KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMPROV KALIMANTAN TIMUR



15 Desember 2020

